

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**SURNA
NIM. 220802105**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Surna

Nim : 220802105

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten
Gayo Lues

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2026



Surna
Surna

NIM. 22080210

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh:
SURNA**

NIM. 220802105

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Musdawati, S.Ag., M.A.

NIP.19750910200901002

Pembimbing II,

Cut Zamharira, S.IP., M.AP

NIP.197911172023212012

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KABUPATEN GAYO LUES

Surna
NIM. 220802105

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2026

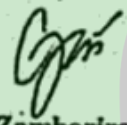
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Musdawati, S.Ag., M.A.
NIP. 19750910200901002

Sekretaris,


Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP 197911172023212012

Penguji I,


Siti Nur Zulkha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji II,


Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.
NIP. 198105052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah merespons persoalan tersebut melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 sebagai upaya untuk memasukkan perspektif gender dalam berbagai tahapan kebijakan dan pembangunan. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin pada periode 2020–2024 masih memperlihatkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2024, IPM laki-laki mencapai 74,91, sedangkan perempuan berada pada angka 67,48. Di Kabupaten Gayo Lues, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada periode yang sama juga masih rendah, yaitu sekitar 5 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan PUG di Kabupaten Gayo Lues serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan yang berasal dari DP3AP2KB, BAPPEDA, Gender Focal Point, aktivis gender, tokoh adat, dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Analisis penelitian menggunakan Contextual Interaction Theory (CIT), yang melihat motivasi, informasi atau kognisi, serta kekuasaan dan sumber daya sebagai karakteristik utama aktor yang memengaruhi proses interaksi dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUG di Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan, tetapi penerapannya belum merata pada ketiga karakteristik tersebut. Dari sisi motivasi, terdapat perbedaan antara dorongan moral dan pribadi pada DP3AP2KB dengan kecenderungan OPD lainnya yang lebih didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan formal. Pemahaman mengenai konsep dan instrumen teknis PUG juga masih lebih banyak dikuasai oleh lembaga penggerak dan belum tersebar secara merata di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Sementara itu, keterbatasan anggaran dan kewenangan Gender Focal Point menjadi faktor yang cukup kuat dalam membatasi pelaksanaan PUG. Penelitian ini turut menemukan hambatan pada konteks spesifik, struktural, dan luas, termasuk pengaruh tatanan adat *Jema Opat* yang secara selektif membatasi ruang partisipasi perempuan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi daerah, peningkatan kemampuan teknis aparatur, pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada Gender Focal Point, serta pelibatan tokoh adat secara strategis untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan PUG di Kabupaten Gayo Lues.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Contextual Interaction Theory, Gayo Lues

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Implementasi Pegasusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Musdawati, S.Ag., M.A., selaku Pembimbing I yang telah membantu mengarahkan, dan memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah membantu mengarahkan, dan memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya, terutama selama menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ayah dan Ibu, mungkin tidak semua perjuangan dan pengorbanan kalian dapat saya balas dengan sempurna. Namun, pencapaian ini adalah salah satu bentuk kecil dari usaha saya untuk membuat kalian bangga. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap dukungan yang diberikan ketika saya merasa lelah menjadi alasan bagi saya untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda terima kasih atas segala hal yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kalian. Terima kasih telah menjadi tempat saya pulang, tempat saya menguatkan diri, dan alasan saya untuk terus melangkah.
8. Kepada kedua kakak dan adik tercinta, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan selalu memberikan dorongan ketika saya menghadapi kesulitan. Dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan saya menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu hadir selama proses perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih telah menemani saya dalam suka maupun duka selama perjalanan ini. Kehadiran kalian membuat proses menyelesaikan pendidikan ini terasa lebih ringan dan berarti.
10. Kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan ketika semuanya terasa berat. Terima kasih telah melewati hari-hari penuh lelah, ragu, kecewa, dan berbagai proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun beberapa kali merasa ingin berhenti. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap langkah kecil,

air mata, doa, dan perjuangan yang pernah dilalui tidak pernah sia-sia. Mungkin perjalanan ini belum sempurna, tetapi saya bangga karena telah sampai di titik ini. Terima kasih telah berjuang sejauh ini.

Banda Aceh, 2026

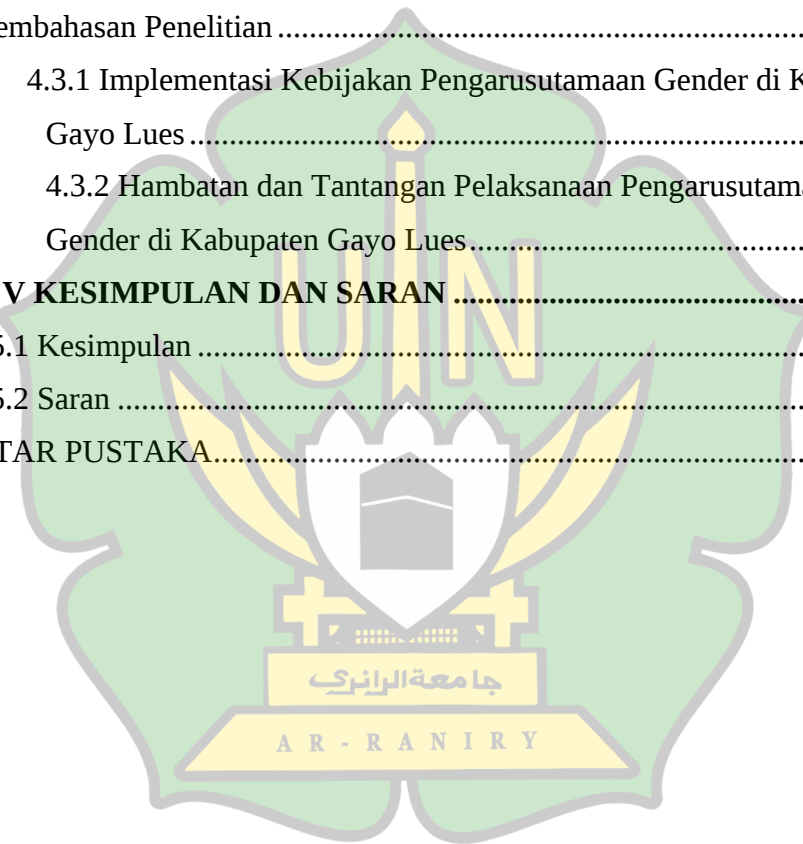
Surna
NIM. 220802105



DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	12
2.1.3 Implementasi Kebijakan	14
2.1.4 Konsep Gender	24
2.1.5 Pengarusutamaan Gender	26
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.2.5 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3. 2 Fokus Penelitian	34
3. 3 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.4 Sumber Data	35
3. 5 Teknik Pengumpulan Data	37
3. 6 Informan Penelitian	39
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	39
3.8 Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues	43
4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Gayo Lues	45
4.2. Hasil Peneltian	46
4.2.1 Motivasi Aktor (Actor's Motivation)	47
4.2.2 Informasi/Kognisi	50
4.2.3 Kekuasaan/Sumber Daya	52
4.2.4 Pemaparan Data Proses Interaksi Antar-Aktor dan Konteks Kultural.....	54
4.3 Pembahasan Penelitian	57
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues	57
4.3.2 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Gayo Lues 2020-2024	4
Tabel 1.2 Keterwakilan Perempuan di DPRK Gayo Lues 2019-2024.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Persentase dan Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan (persen/ km ²).....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	80
Lampiran 2 Pertanyaan Surat Keputusan.....	86
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 4 Balasan Penelitian DP3A2KB	88
Lampiran 5 Balasan Penelitian BAPPEDA	89
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang berkelanjutan secara fundamental bertumpu pada inklusivitas dan partisipasi setara dari seluruh elemen masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar berupa ketimpangan gender yang termanifestasi dalam bentuk diskriminasi serta marginalisasi sistemik.¹ Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga menjadi penghambat utama bagi optimalisasi potensi sumber daya manusia nasional. Menanggapi urgensi tersebut, pemerintah mengadopsi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai instrumen sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap fase kebijakan. Mandat ini diperkuat secara legal melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai pilar dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan.²

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan nasional yang mengedepankan perspektif gender. Agar PUG dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan kesetaraan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif. Ini mencakup lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan, dan hingga

¹ Hasnidar Yuslin, "Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia* 1, no. 3 (2021)

² Pemerintah Republik Indonesia, "Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional," *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2000.

unit terkecil, yaitu keluarga.³ PUG seharusnya dipahami sebagai strategi yang holistik, bukan sekadar rangkaian kegiatan atau program. Strategi ini mengintegrasikan gender sebagai aspek fundamental dalam upaya mencapai pembangunan yang adil dan setara.⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan nasional, menjadikannya sebagai pilar yang tak terpisahkan. Dengan melibatkan berbagai kalangan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁵

Selain itu ditingkat nasional komitmen terhadap kesetaraan gender telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020–2024. Dokumen perencanaan ini merumuskan arah kebijakan serta strategi guna mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender melalui lima pilar utama.⁶ Pertama, dengan memperkuat regulasi dan kebijakan yang ada. Kedua, mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh lini pemerintahan mulai dari kementerian/lembaga, pemda, hingga tingkat desa lewat penguatan kelembagaan serta Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Ketiga, memperluas edukasi dan pemahaman gender ke ruang publik, melibatkan individu, keluarga, komunitas, media, hingga sektor swasta. Keempat, mendorong keterlibatan aktif perempuan di sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan,

³Yuslin, “Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Di Indonesia.”

⁴ Anisa Tri Ayissa Tazkia, Listyaningsih, and Juliannes Cadith, "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>.

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Jakarta: Bappenas, 2020)

ekonomi, ketenagakerjaan, hingga ranah politik dan pengambilan keputusan. Terakhir, menyolidkan jejaring kooperatif antara instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sipil serta dunia usaha.

Merespon tuntutan nasional, Pemerintah Aceh menegaskan komitmen pembangunan berkeadilan gender melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2009 sebagai payung hukum utama pemberdayaan perempuan. Namun, sebagai daerah istimewa yang menerapkan Syariat Islam, Provinsi Aceh memiliki dinamika tersendiri terkait isu perempuan. Hingga saat ini, angka partisipasi perempuan di ranah politik dan sektor pekerjaan formal masih tergolong rendah. Selain itu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi menjadi alarm bagi efektivitas kebijakan perlindungan sosial di daerah. Kondisi ini diperumit dengan hambatan implementasi PUG di tingkat daerah yang belum berjalan optimal. Meskipun Inpres PUG telah eksis selama lebih dari dua dekade, implementasinya belum berjalan secara optimal disebabkan karena kurangnya SDM, kurang pemahaman tentang PUG, anggaran yang terbatas, serta komitmen pemerintah untuk menjalankan PUG nya sendiri cenderung lemah.⁷

Kemudian kegagalan implementasi PUG sering kali berakar pada miskonsepsi sosiokultural yang mendalam. Di tengah kehidupan bermasyarakat, istilah "gender" sering kali disalahartikan hanya sebagai urusan perempuan semata, atau bahkan dianggap sebagai agenda luar yang berpotensi merusak tatanan nilai lokal. Resistensi ini menyebabkan strategi PUG sulit diterima secara universal pada tatanan sosial masyarakat luas. Di Kabupaten Gayo Lues, tantangan ini terlihat nyata

⁷ Rasyidah dan Ismiati, *Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Aceh Tahun 2023–2026* (Banda Aceh: Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan SDM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, 2022).

melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia antar jenis kelamin masih mengalami ketimpangan yang cukup signifikan, meskipun secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Gayo Lues 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin	
		Laki – Laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	2020	72,60	64,55
2.	2021	72,91	65,14
3.	2022	73,57	65,83
4.	2023	74,27	66,57
5.	2024	74,91	67,48

Sumber: BPS Kabupaten Gayo Lues, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, perkembangan IPM Kabupaten Gayo Lues menurut jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang konsisten naik. Kendati demikian, angka IPM laki-laki dan IPM perempuan dari tahun ke tahun memang selalu memiliki selisih yang lebar, di mana IPM laki-laki jauh lebih tinggi daripada IPM perempuan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan capaian, riilnya masih ada kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gayo Lues. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan peran-peran strategis serta intervensi kebijakan yang lebih terarah agar bisa mengatasi kendala struktural dalam mengarusutamakan gender di wilayah tersebut.

Ketimpangan capaian IPM tersebut selaras dengan kondisi struktural lainnya di lapangan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2025

menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki mencapai 84,03 persen, sementara TPAK perempuan hanya sebesar 72,79 persen yang dimana perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki.⁸ Kesenjangan serupa juga terlihat dari sisi pendidikan, di mana angka pendidikan SMA ke atas pada laki-laki tercatat sebesar 47,48 persen, sementara pada perempuan hanya sebesar 36,77 persen.⁹ Ketimpangan pada aspek pendidikan dan ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Gayo Lues yang hanya menyentuh angka 5 persen pada periode 2019-2024. Pola yang berulang pada ketiga aspek ini, mulai dari pendidikan, dunia kerja, hingga politik, menegaskan adanya hambatan struktural dan stigma budaya patriarki yang masih mengakar kuat di tatanan sosial masyarakat Gayo Lues.¹⁰

Kondisi rendahnya keterwakilan perempuan tersebut dapat dilihat lebih rinci pada komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues periode 2019-2024 berikut ini.

**Tabel 1. 2 Keterwakilan Perempuan di DPRK Gayo Lues
(Periode 2019-2024)**

Kategori Legislator	Jumlah Anggota (Orang)	Persentase (%)
Anggota Dewan Laki-Laki	19	95,00%
Anggota Dewan Perempuan	1	5,00%
Total Kursi Parlemen	20	100,00%

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2025.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Persentase Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (SMA Sederajat ke Atas) dan Jenis Kelamin, 2025.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues (2025). Data perkembangan berkala juga disarikan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues Tahun 2025-2029

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues, Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Gayo Lues Tahun 2019

Data pada Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa dari 20 kursi yang tersedia di DPRK Gayo Lues, hanya satu kursi yang diisi oleh perempuan, sementara 19 kursi lainnya diisi oleh laki-laki.¹¹ Rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi mencerminkan minimnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Kondisi ini tidak lepas dari faktor budaya patriarki yang masih mengakar di tengah masyarakat Gayo Lues, di mana ranah politik kerap dipandang sebagai wilayah laki-laki.¹² Selain faktor budaya, minat perempuan untuk terjun ke dunia politik juga masih tergolong rendah, baik karena keterbatasan akses informasi maupun karena kurangnya dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya peran perempuan dalam lembaga eksekutif maupun legislatif, agar perempuan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga turut berperan sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan pembangunan di daerahnya.

Padahal, Instruksi Presiden mengenai pengarusutamaan gender sudah diterbitkan sejak tahun 2000. Secara lebih teknis, implementasi PUG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues, Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Gayo Lues Tahun 2019.

¹² Rahma Ning Tias, dkk., "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif," Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 13, no. 2 (2022).

Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan PUG dengan cara menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).¹³

Sejalan dengan mandat tersebut, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebenarnya telah berupaya menjalankan amanat PUG. Upaya ini dibuktikan dengan adanya langkah konkret berupa serangkaian sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).¹⁴ Namun sayangnya, semua upaya administratif dan sosialisasi tersebut belum mampu memberikan perubahan nyata di lapangan. Buktinya, kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gayo Lues masih terbilang lebar. Kegagalan ini tidak lepas dari sejumlah kendala internal yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan PUG, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaksana, dan lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan program ini secara konsisten. Ketiga faktor tersebut menjadi penyebab utama mengapa upaya administratif yang telah dilakukan belum mampu mendorong perubahan nyata terhadap capaian pembangunan gender di Kabupaten Gayo Lues. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan kebijakan di atas kertas dengan realita pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

¹³ Dra. Mustabsyirah Husein, Dr. Rasyidah, Azmil Umur, Dr. Zulfatmi, dan Sakdiah, *Profil Gender Gayo Lues Tahun 2019* (Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2019).

¹⁴ Zubaidah, S.I. Kom, "Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Aula The Legend," *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues*, 16 Juli 2024.

menganalisis proses implementasi PUG tersebut menggunakan kacamata kebijakan publik, guna menemukan hambatan nyata yang membuat kebijakan ini belum berjalan secara optimal.

Kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan capaian di lapangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan aturan formal semata. Sejumlah studi implementasi kebijakan menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan justru terletak pada karakteristik aktor yang menjalankan kebijakan tersebut di lapangan, mulai dari motivasi, pemahaman terhadap substansi kebijakan, hingga ketersediaan sumber daya pendukung.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dinamika interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues, guna memahami secara lebih mendalam mengapa implementasi kebijakan ini belum mampu memberikan perubahan nyata meskipun landasan hukumnya telah ada.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gayo Lues dengan judul: **"Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Belum optimalnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues meskipun landasan hukum telah tersedia. Hal ini ditandai oleh rendahnya angka partisipasi perempuan di sektor formal dan politik (hanya 5% di

¹⁵ Janet Michel et al., "Policy Context, Coherence and Disjuncture in the Implementation of the Ideal Clinic Realisation and Maintenance Programme in the Gauteng and Mpumalanga Provinces of South Africa," *Health Research Policy and Systems* 18 (2020): 55, <https://doi.org/10.1186/s12961-020-00567-z>.

legislatif), serta masih kuatnya hambatan sosiokultural berupa stigma patriarki dan miskonsepsi terhadap makna gender. Selain itu, kendala internal seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan lemahnya komitmen pemerintah daerah menyebabkan upaya administratif yang dilakukan belum mampu memberikan perubahan nyata terhadap angka Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Gayo Lues.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa hambatan dan tantangan dari pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues?

1.4 Tujuan Penelitian

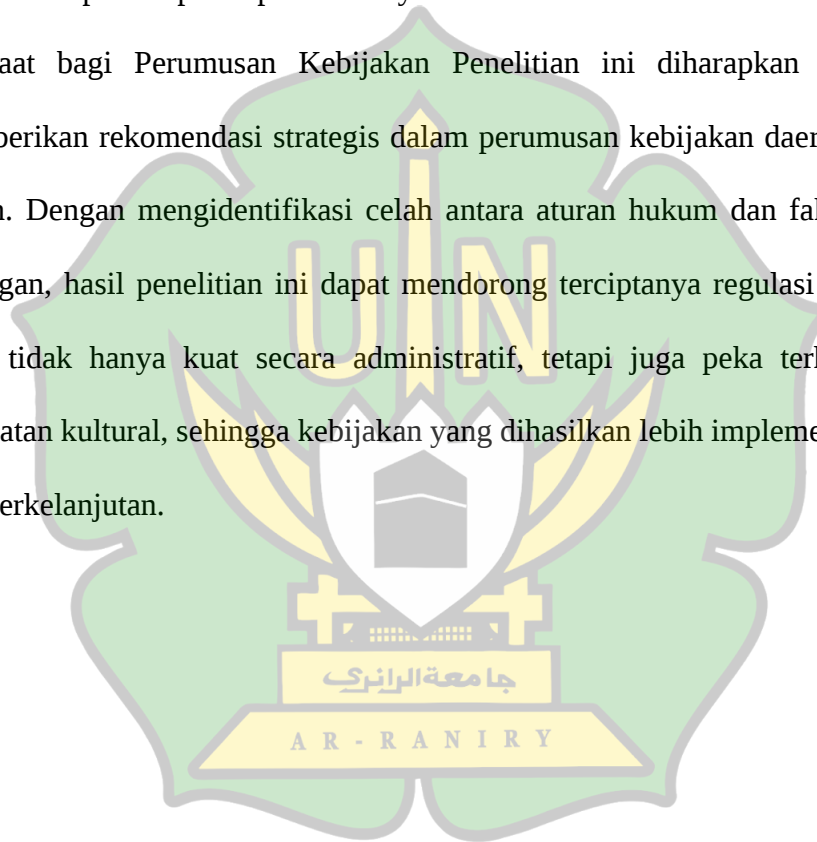
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Gayo Lues. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan nyata yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis guna menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai lokal untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesetaraan bagi perempuan di Kabupaten Gayo Lues.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur dalam studi ilmu sosial dan politik, khususnya yang berkaitan dengan dinamika gender di tingkat lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah atau pembanding bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu Pengarusutamaan Gender (PUG) pada wilayah yang memiliki karakteristik budaya serupa dengan masyarakat Gayo.
2. Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana teori kesetaraan gender dan kebijakan nasional (PUG) berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang bersifat patriarki. Hal ini memberikan perspektif baru tentang efektivitas adaptasi kebijakan global dan nasional ketika diterapkan dalam konteks masyarakat adat di Indonesia.
3. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Gayo Lues mengenai pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi instrumen edukasi bagi kelompok masyarakat dan organisasi lokal untuk mulai mengikis stigma negatif terhadap peran publik perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif.
4. Manfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) yang berkaitan dengan keadilan gender. Informasi mengenai hambatan struktural yang ditemukan dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Penelitian ini memberikan masukan konkret bagi OPD terkait, seperti DP3AP2KB dan Bappeda, dalam menyusun Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Hasil analisis tantangan di lapangan dapat membantu OPD dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan di Gayo Lues.
6. Manfaat bagi Perumusan Kebijakan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan daerah ke depan. Dengan mengidentifikasi celah antara aturan hukum dan fakta di lapangan, hasil penelitian ini dapat mendorong terciptanya regulasi lokal yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga peka terhadap hambatan kultural, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih implementatif dan berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara terarah dan strategis untuk menangani persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁶ Dalam konteks ini, kebijakan publik berfungsi sebagai medium intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah untuk memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Melalui kebijakan ini, diharapkan kelompok tersebut dapat lebih berperan aktif dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya secara merata. Definisi kebijakan publik (public policy) itu sendiri sangat beragam dan kompleks, bergantung pada perspektif yang digunakan.¹⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik tidak hanya sekadar kumpulan dokumen atau pernyataan, tetapi merujuk pada tindakan yang terencana dan terstruktur untuk mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat.

Menurut Leo Agustino, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dirancang dan diajukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam menghadapi kondisi tertentu. Tindakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai hambatan dan peluang yang ada, sehingga kebijakan

¹⁶ Sekar Sion Napitupulu, "*Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*" (skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, 2022), 10.

¹⁷ Napitupulu, "Implementasi Pengarusutamaan Gender," 10.

dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah komitmen nyata dari pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam menghadapi suatu isu tertentu.¹⁹

Anderson dalam Tangkilisan menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh lembaga pemerintah melalui aparatur yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan publik dapat dipahami melalui beberapa hal penting yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaannya.²⁰

- a. Tujuan Tertentu: Kebijakan pemerintah selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap langkah dan tindakan dalam kebijakan tersebut biasanya terencana dengan baik, mencerminkan visi serta misi yang ingin dicapai oleh pemerintah.
- b. Tindakan dan Pola Perilaku: Kebijakan tersebut mencakup tindakan atau pola-pola perilaku yang harus diikuti oleh pejabat-pejabat pemerintah selama pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa ada sistem dan prosedur yang jelas yang harus diikuti dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
- c. Realitas Tindakan Pemerintah: Kebijakan publik dapat dilihat dari tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, bukan

¹⁸ Devi Wulandari, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah" (skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2023), 1.

¹⁹ Wulandari, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender," 1.

²⁰ Sekar Sion Napitupulu, "Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara" (Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, 2022), hlm.10-11

hanya dari rencana atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata.

- d. Dasar Hukum dan Sifat Memaksa: Kebijakan pemerintah biasanya berdasar pada undang-undang yang berlaku dan memiliki sifat mengikat. Ini berarti bahwa kebijakan tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi juga harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang serta dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaannya diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, mendorong terciptanya keadilan sosial, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Dengan pelaksanaan kebijakan yang tepat, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik merupakan rangkaian yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai tahapan serta sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan.²¹ Oleh sebab itu, para ahli kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahapan agar setiap proses dapat dipahami

²¹ Siti Marwiyah, *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik* (CV Mitra Ilmu, 2022), 14–16.

secara lebih sistematis. Menurut William N. Dunn, tahapan dalam proses kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

a. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda adalah tahap strategis dalam proses pengaturan kebijakan publik. Pada tahap ini diputuskan isu mana yang layak dimasukkan ke dalam perhatian pembuat kebijakan. Isu public sering disebut masalah kebijakan-muncul ketika para aktor memiliki perbedaan pendapat tentang sifat masalah atau tindakan yang perlu diambil. Proses penyusunan agenda menentukan ruang bagi isu-isu tersebut untuk ditangani.

b. Perumusan kebijakan

Setelah suatu masalah masuk ke agenda, masalah itu dibahas lebih lanjut oleh pembuat kebijakan untuk mencari solusi terbaik. Tahap perumusan melibatkan identifikasi berbagai alternatif kebijakan dan penilaian mana yang paling sesuai untuk memecahkan masalah. Seperti halnya perebutan tempat di agenda, berbagai opsi kebijakan bersaing untuk dipilih sebagai tindakan resmi.

c. Adopsi dan legitimasi kebijakan

Tahap adopsi berfokus pada pemberian otoritas formal terhadap kebijakan yang diusulkan. Legitimasi penting agar tindakan pemerintah mendapat dukungan warga; bila kedaulatan rakyat menjadi dasar pengambilan keputusan, masyarakat akan lebih cenderung mengikuti kebijakan yang mereka anggap sah. Legitimasi dapat diperkuat melalui simbol, komunikasi, dan proses yang membuat masyarakat menerima dan mendukung keputusan pemerintah.

²²Marwiyah, *Kebijakan Publik*, 14–16.

d. Implementasi kebijakan

Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui. Pada tahap ini unit-unit administrasi menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan nyata dengan mengerahkan sumber daya baik dana maupun tenaga untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

e. Evaluasi atau penilaian kebijakan

Evaluasi meliputi penilaian terhadap isi kebijakan, cara pelaksanaannya, serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi dianggap sebagai fungsi berkelanjutan, bukan hanya kegiatan akhir. Dengan demikian, penilaian dapat dilakukan sepanjang siklus kebijakan: saat perumusan masalah, penilaian alternatif program, selama pelaksanaan, dan setelah kebijakan berdampak di lapangan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

A. Konsep dan Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kusumanegara, implementasi dapat dipahami sebagai keluaran dari suatu kebijakan yang dapat dilihat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan program. Dalam proses tersebut, perlu diperhatikan apakah pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan arahan yang ditetapkan sebelumnya atau justru terdapat penyimpangan.²³ Implementasi kebijakan adalah tahap krusial yang menjembatani antara pembentukan suatu kebijakan dan dampak nyata yang ditimbulkannya pada masyarakat yang terpengaruh. Ketika suatu kebijakan tidak mampu mengatasi masalah yang ditargetkan, risiko kegagalan menjadi tinggi, meskipun langkah-langkah implementasinya dilakukan dengan sangat baik dan terencana.²⁴ Sebaliknya, meskipun suatu kebijakan dirancang dengan cermat dan

²³ Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua* (2023).

²⁴ Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik*, 1–2.

dianggap cemerlang, hal tersebut tetap bisa berujung pada kegagalan jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan optimal oleh para pihak yang bertanggung jawab.²⁵

Dalam pandangan Islamy, efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana tahap perencanaannya telah menyertakan aspek operasional dan parameter keberhasilan yang konkret.²⁶ Meski krusial, perhatian dunia akademik terhadap fase eksekusi ini baru benar-benar mencuat pada medio 1970-an. Hal ini dipicu oleh terbitnya studi fenomenal karya Pressman dan Wildavsky (1973) yang bertajuk *Implementation*, yang kemudian menggeser fokus para ilmuwan untuk lebih mendalami realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.²⁷

Untuk membedah konsep ini secara mendalam, penting bagi kita menelusuri akar kata implementasi itu sendiri. Merujuk pada kamus Webster, istilah *to implement* secara leksikografis mengandung makna penyediaan sarana guna menjalankan sesuatu, serta upaya menciptakan dampak nyata dari sebuah rencana.²⁸ Jika ditarik ke dalam ranah publik, maka implementasi dapat dimaknai sebagai rangkaian proses untuk merealisasikan keputusan-keputusan politis, baik yang tertuang dalam bentuk undang-undang, regulasi pemerintah, hingga keputusan eksekutif maupun mandat presiden.²⁹

²⁵ Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2.

²⁶ Dwi Tazqiatul Barroroh, "*Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Kota Batu*" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020), 23.

²⁷ Samsu et al., *Analisis Kebijakan dalam Manajemen Pendidikan Islam*, ed. M. Thontawi dan Sri Kadarsih (Tanjung Jabung Timur, Jambi: Zabags Qu Publish, 2025), 45–58

²⁸ Samsu et al., *Analisis Kebijakan dalam Manajemen Pendidikan Islam*, 48.

²⁹ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 83.

Abdul Wahab menegaskan bahwa esensi dari sebuah kebijakan publik bukan terletak pada proses penyusunannya, melainkan pada tahap eksekusinya. Mengutip pemikiran Udoji, ia menekankan bahwa tanpa implementasi yang nyata, sebuah kebijakan hanyalah sekumpulan dokumen administratif atau "mimpi" yang tersimpan dalam arsip.³⁰ Tahap implementasi menjadi variabel penentu yang krusial, karena melalui proses inilah efektivitas, keberhasilan, atau kegagalan suatu kebijakan dapat diuji dan dievaluasi secara objektif demi perbaikan di masa mendatang. Implementasi juga dipandang sebagai proses pengoperasionalan undang-undang yang melibatkan sinergi antara berbagai aktor, organisasi, serta prosedur teknis. Rasionalitas di balik pengorganisasian berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) ini adalah untuk memastikan bahwa pola pikir dan perilaku seluruh pihak yang terlibat tetap berada dalam koridor yang disepakati.³¹ Dengan adanya kontrol dan koordinasi yang terintegrasi, target serta sasaran kebijakan dapat dicapai secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut pandangan Rian Nugroho, implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan instrumen utama untuk merealisasikan tujuan-tujuan strategis yang telah disusun. Inti dari tahapan ini adalah sejauh mana tindakan nyata di lapangan mampu memenuhi target yang diprogramkan secara memuaskan.³² Sejalan dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang seluruhnya bermuara pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

³⁰ Ika Widiastuti, *Kebijakan Publik*, ed. Sunarno S. Atmodjo (Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2022), 45.

³¹ Widiastuti, *Kebijakan Publik*, 45-46.

³² Widiastuti, *Kebijakan Publik*, 45-46.

sebelumnya.³³ Kemudian Muchlis Hamdi menekankan bahwa fase pelaksanaan ini mencerminkan bagaimana birokrasi bekerja dan mengelola proses teknis agar sebuah kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan mampu menciptakan kondisi atau perubahan sosial sesuai dengan rencana awal.³⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan (*policy cycle*) yang bersifat operasional dan dapat dikaji melalui program-program spesifik. Fokus utama dalam studi analisis kebijakan publik adalah untuk membedah dinamika yang muncul di lapangan tepat setelah sebuah regulasi disahkan.³⁵ Tahapan inilah yang menjadi jembatan untuk melihat sejauh mana rencana-rencana formal tersebut mampu diterjemahkan ke dalam aksi nyata.

B. Teori Contextual Interaction Theory (CIT)

Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Contextual Interaction Theory* (CIT) yang dikembangkan oleh Hans Bressers. Teori ini memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari proses interaksi yang terjadi antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.³⁶ Teori ini mulai dikembangkan sejak awal tahun 2000-an dan disempurnakan dalam berbagai publikasi pada tahun 2007, 2011, hingga 2016. Berbeda dengan teori implementasi klasik yang lebih menitikberatkan pada isi

³³ Devi Wulandari, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2023), hlm. 11.

³⁴ Wulandari, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender," 12.

³⁵ Widiastuti, *Kebijakan Publik*, 2-3.

³⁶ Hans Bressers, *Contextual Interaction Theory and the Issue of Boundary Definition: Governance and the Motivation, Cognitions, and Resources of Actors*, CSTM Studies and Reports No. 323 (Enschede: University of Twente, Center for Clean Technology and Environmental Policy, 2007).

kebijakan atau struktur organisasi, CIT menempatkan aktor pelaksana sebagai faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan.³⁷ Menurut Bressers, pelaksanaan kebijakan dapat dipahami sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi antara para aktor yang terlibat. Pola interaksi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing aktor, yang selanjutnya menentukan cara mereka merespons kebijakan, bekerja sama, menghadapi perbedaan kepentingan, serta berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam perkembangannya, Bressers menjelaskan bahwa berbagai faktor eksternal, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun kelembagaan memang dapat memengaruhi implementasi kebijakan.³⁹ Akan tetapi, pengaruh tersebut bekerja melalui perubahan terhadap karakteristik aktor yang melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, fokus utama analisis implementasi menurut Contextual Interaction Theory terletak pada tiga karakteristik aktor yang melaksanakan kebijakan, yaitu motivasi (motivation), informasi atau kognisi (information/cognitions), serta kekuasaan atau sumber daya (power/resources).⁴⁰ Ketiga karakteristik ini melekat pada dua kategori aktor sekaligus, yaitu aktor pelaksana kebijakan (implementer) dan aktor sasaran kebijakan (target group). Perpaduan antara ketiga karakteristik pada kedua kategori aktor inilah yang kemudian menghasilkan proses interaksi (interaction process), yaitu pola hubungan antaraktor berupa kerja sama, negosiasi, penghindaran, maupun konflik, yang pada akhirnya menentukan bentuk dan hasil implementasi kebijakan.⁴¹

³⁷ Bressers, *Contextual Interaction Theory*.

³⁸ Cheryl de Boer dan Hans Bressers, *Analyzing the Renaturalization of the Dutch Regge River: Complex and Dynamic Implementation Processes* (Enschede: University of Twente, 2011), hlm. 57-58.

³⁹ De Boer dan Bressers, *Complex and Dynamic Implementation Processes*.

⁴⁰ Hans Bressers et al., "The Governance Assessment Tool and Its Use," dalam *Governance for Drought Resilience: Land and Water Drought Management in Europe*, ed. Hans Bressers, Nanny Bressers, dan Corinne Larrue (Cham: Springer International Publishing, 2016), 45-65.

⁴¹ De Boer and Bressers, *Complex and Dynamic Implementation Processes*. 71-72.

Teori ini dipandang relevan dalam penelitian mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) karena pelaksanaan PUG melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, organisasi masyarakat, serta kelompok penerima manfaat. Keberhasilan implementasi PUG tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, pemahaman terhadap konsep gender, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi yang terbangun antarinstansi. Dengan demikian, Contextual Interaction Theory mampu menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan Contextual Interaction Theory, terdapat tiga karakteristik utama aktor dan proses interaksi sebagai hasil interaksi karakteristik tersebut yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, menurut De Boer dan Bressers yaitu:⁴²

1. Motivasi (Motivation)

Motivasi merupakan dorongan yang memengaruhi kemauan aktor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Menurut Bressers, motivasi dapat berasal dari tujuan organisasi, nilai yang diyakini oleh pelaksana, kepentingan institusi, maupun dorongan pribadi. Motivasi menentukan tingkat komitmen aktor dalam melaksanakan kebijakan sehingga menjadi faktor awal yang memengaruhi proses implementasi.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), motivasi dapat dilihat dari komitmen kepala daerah, pimpinan OPD, dan aparatur dalam memasukkan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Semakin kuat motivasi yang dimiliki, semakin besar pula dorongan

⁴² De Boer dan Bressers, *Complex and Dynamic Implementation Processes*, 69–71.

aparatur untuk menjalankan PUG secara konsisten meskipun terdapat berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya.

2. Information/cognitions

Informasi dalam perspektif CIT berkaitan dengan sejauh mana aktor mengetahui, memahami, dan menguasai isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Bressers menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif apabila para aktor memahami tujuan kebijakan, tata cara pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, serta dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Sebaliknya, keterbatasan informasi dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan dan mengurangi efektivitas kebijakan.

Dalam pelaksanaan PUG, aspek informasi mencakup pemahaman aparatur terhadap konsep gender, ketentuan yang mengatur PUG, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta kemampuan dalam menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan menggunakan *Gender Budget Statement* (GBS). Penguasaan yang baik terhadap berbagai instrumen tersebut dapat mendukung pelaksanaan PUG agar berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Kekuasaan atau Sumber Daya (Resources)

Sumber daya menunjukkan kemampuan aktor dalam melaksanakan kebijakan. Dalam CIT, sumber daya tidak hanya mencakup anggaran, tetapi juga sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, serta kemampuan teknis yang dimiliki oleh pelaksana. Keterbatasan sumber daya akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun motivasi aktor tinggi.

Dalam pelaksanaan PUG, kapasitas organisasi dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai isu gender, dukungan

anggaran yang responsif gender, data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin, serta kelembagaan pendukung seperti Pokja PUG dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Proses Interaksi (*Interaction Process*) sebagai Hasil dari Ketiga Karakteristik Aktor

Berbeda dari motivasi, informasi, dan kekuasaan yang merupakan karakteristik melekat pada masing-masing aktor, interaksi bukanlah karakteristik keempat yang berdiri sejajar, melainkan proses yang terbentuk dari pertemuan ketiga karakteristik tersebut antara aktor pelaksana dan aktor sasaran.⁴³ Bressers menegaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari proses hubungan antaraktor ini. Proses interaksi tersebut dapat berbentuk koordinasi, komunikasi, negosiasi, kerja sama, penghindaran, maupun konflik yang muncul selama pelaksanaan kebijak.⁴⁴ Kualitas proses interaksi inilah yang pada akhirnya menentukan arah dan hasil implementasi.

Dalam implementasi PUG, interaksi diperlukan karena pelaksanaannya melibatkan banyak organisasi perangkat daerah. DP3AP2KB perlu membangun koordinasi dengan Bappeda, Badan Pengelola Keuangan, dinas teknis, serta organisasi masyarakat agar perspektif gender dapat terintegrasi dalam seluruh proses Pembangunan.

C. Lapisan Konteks dalam Contextual Interaction Theory

Selain ketiga karakteristik aktor beserta proses interaksi yang dihasilkannya di atas, Bressers menegaskan bahwa motivasi, informasi, sumber daya, dan interaksi

⁴³ De Boer dan Bressers, *Complex and Dynamic Implementation Processes*, 57–65

⁴⁴ De Boer and Bressers, *Complex and Dynamic Implementation Processes*, 65.

tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh konteks yang melingkupi para aktor tersebut.⁴⁵ Konteks ini terbagi ke dalam tiga lapisan, yaitu konteks spesifik, konteks struktural, dan konteks luas. Konteks spesifik mencakup kondisi khas di lokasi penelitian, seperti sejarah kebijakan setempat dan situasi lapangan yang berlaku pada waktu tertentu. Konteks struktural berkaitan dengan aturan main, kewenangan lembaga, serta jaringan antaraktor yang membingkai bagaimana kebijakan dijalankan. Adapun konteks luas mencakup nilai sosial budaya, sistem politik, dan kondisi ekonomi yang lebih besar, yang secara tidak langsung ikut menentukan motivasi dan sikap aktor pelaksana kebijakan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, konteks luas berupa nilai budaya adat Gayo dan norma patriarki yang telah diuraikan pada latar belakang menjadi lapisan penting yang turut membentuk motivasi, pemahaman, serta pola interaksi aktor pelaksana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues. Dengan memasukkan lapisan konteks ini, analisis terhadap empat karakteristik aktor tidak hanya berhenti pada aspek teknis administratif, tetapi juga menjangkau akar sosiokultural yang menjadi ciri khas wilayah penelitian.

2.1.4 Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Gender dapat dipahami sebagai konsep yang berkaitan dengan peran, perilaku, tanggung jawab, dan karakteristik yang terbentuk berdasarkan nilai serta harapan

⁴⁵ Cheryl de Boer and Hans Bressers, *Complex and Dynamic Implementation Processes: The Renaturalization of the Dutch Regge River* (Enschede: University of Twente, 2011), 72.

⁴⁶ De Boer dan Bressers, *Analyzing the Renaturalization*, 72-73.

masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Berbeda dengan jenis kelamin yang berkaitan dengan kondisi biologis, gender terbentuk melalui proses sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman mengenai gender dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai yang berlaku di masyarakat. Pembentukan pandangan tentang gender juga dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tradisi, nilai agama, pendidikan, serta media massa yang turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan.⁴⁸ Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai gender diperlukan untuk mendorong penghargaan terhadap keberagaman peran individu sekaligus menciptakan kehidupan sosial yang lebih setara, terbuka, dan adil.

Istilah *gender* pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller sebagai upaya untuk membedakan aspek biologis dari peran dan karakteristik yang terbentuk dalam kehidupan sosial dan budaya.⁴⁹ Menurut Ann Oakley, gender merupakan hasil konstruksi sosial yang berkaitan dengan atribut, peran, dan perilaku yang dibentuk melalui norma serta nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata berasal dari faktor biologis, tetapi terbentuk melalui proses sosial dan budaya yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰

Gender dapat dipahami sebagai konsep yang terbentuk dalam budaya masyarakat dan digunakan untuk membedakan peran, perilaku, pola pikir, serta

⁴⁷ Wahjoe Pangestoeti dan Suryaningsih, *Gender dan Kebijakan Publik di Indonesia* (Tanjungpinang: Laboratorium Komunikasi dan Sosial FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024), 11.

⁴⁸ Pangestoeti dan Suryaningsih, *Gender dan Kebijakan Publik di Indonesia*, 13-14.

⁴⁹ Nur Azizah, Nurhaemin, dan Sulaeman, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut KH. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 3 (April 2024): 67.

⁵⁰ Azizah, Nurhaemin, dan Sulaeman, "Konsep Kesetaraan Gender," 67.

karakteristik yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.⁵¹ Berdasarkan pandangan dalam buku *Sex, Gender, and Society*, perbedaan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak terlihat dari perilaku yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Karena dipengaruhi oleh budaya, gender tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perbedaan sesuai dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial masyarakat, termasuk kelas sosial seseorang.⁵² Hal ini berbeda dengan jenis kelamin (*seks*) yang berkaitan dengan aspek biologis dan pada dasarnya tidak berubah berdasarkan tempat maupun lingkungan sosial individu.

Dalam konteks tersebut, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa gender berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial dan budaya yang berlaku.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang gender sangat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa gender tidak bersifat tetap, ia dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman hidup individu serta kelompok dalam masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui

⁵¹ Sonny Dewi Judiasih, "Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (Juni 2022): 285.

⁵² Nanik Mandasari, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi)," *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 2, no. 2 (September 2022): 52

⁵³ Mandasari, "Analisis Pengarusutamaan Gender," 52

⁵⁴ Mandasari, "Analisis Pengarusutamaan Gender," 55

proses sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵ Sejalan dengan pandangan Nugroho, gender dipahami sebagai produk sosial yang tidak bersifat bawaan sejak lahir (*non-biologis*). Identitas ini bersifat dinamis karena pembentukannya sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan, seperti latar belakang suku, perkembangan zaman, strata sosial, nilai agama, hingga sistem politik dan ekonomi yang berlaku di suatu wilayah.⁵⁶ Oleh karena itu, gender berbeda dengan kodrat biologis yang bersifat tetap. Gender terbentuk melalui proses sosial dan budaya sehingga sifat, peran, maupun tanggung jawab yang melekat pada laki-laki dan perempuan dapat berubah serta tidak selalu bersifat mutlak. Hal tersebut berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang berkaitan dengan kondisi biologis individu. Karakteristik biologis tersebut pada dasarnya bersifat tetap dan tidak bergantung pada lingkungan sosial maupun budaya tempat seseorang berada.⁵⁷

2.1.5 Pengarusutamaan Gender

Economic and Social Council (ECOSOC) PBB mendefinisikan pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming sebagai sebuah proses evaluatif untuk meninjau dampak dari setiap tindakan yang direncanakan terhadap laki-laki maupun perempuan, mulai dari tahap penyusunan regulasi, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan program di berbagai tingkatan dan sektor.⁵⁸ Sebagai suatu strategi, PUG bertujuan memasukkan kebutuhan dan pengalaman laki-laki maupun perempuan ke dalam setiap proses kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, pemantauan,

⁵⁵ Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323–44.

⁵⁶ Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Inovasi Kabupaten Kudus, “*Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025–2029*,” 2026.

⁵⁷ Mazaya, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam.”

⁵⁸ Widjajanti M. Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar* (Jakarta: LIPI Press, 2016), 37.

hingga evaluasi pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh masyarakat.⁵⁹

Di Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjelaskan PUG sebagai upaya untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan serta kendali yang seimbang dalam mengakses sumber daya dan menikmati hasil pembangunan.⁶⁰ Proses tersebut juga menekankan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pada berbagai tahapan pembangunan, mulai dari proyek, program, hingga kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perspektif gender perlu menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi setiap kebijakan maupun program pembangunan.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, diperlukan strategi yang terarah serta pelaksanaan yang berkelanjutan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan PUG sebagai salah satu kebijakan nasional melalui GBHN Tahun 1999 yang mendorong setiap lembaga terkait untuk berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender.⁶¹ Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah untuk memasukkan

⁵⁹ Santoso et al., *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender*, 11–13

⁶⁰ Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender*, 12.

⁶¹ Sekar Sion Napitupulu, *Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara* (Medan: Universitas Medan Area, 2022).

perspektif kesetaraan gender dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan serta program pembangunan.⁶²

Pada dasarnya, PUG ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam pemenuhan hak maupun kesempatan memperoleh akses dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Selain itu, PUG juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gender, baik yang bersifat praktis maupun strategis.⁶³ Dengan demikian, pengarusutamaan gender diharapkan mampu mengurangi kesenjangan dalam akses dan manfaat pembangunan antara kedua kelompok gender di Indonesia, sekaligus meningkatkan partisipasi dan kontrol perempuan dalam proses pembangunan yang lebih luas.⁶⁴



⁶² Napitupulu, "Implementasi Pengarusutamaan Gender," 20–21.

⁶³ Anita Rahminigrum dan Ike Rachmawati, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Sukabumi," JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan 2, no. 1 (2024): 47–55.

⁶⁴ Rahminigrum dan Rachmawati, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender," 47–55.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan referensi untuk menghindari duplikasi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis/Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Teori	Metode Peneleitian	Hasil Penelitian	Gap Research
1.	Savitri dkk. (2024). ⁶⁵	Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara.	Teori Stereotip Gender	Deskriptif kualitatif	Pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan telah diterapkan pada berbagai jenjang, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kuatnya stereotip gender di masyarakat dan perbedaan pemahaman antar pemangku kepentingan.	Lokus penelitian terbatas pada satu sektor yaitu pendidikan di tingkat desa, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi PUG secara lintas sektor pada level pemerintahan kabupaten

⁶⁵ Fia Nyimas Savitri et al., "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Sistem Pendidikan Di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 1–10.

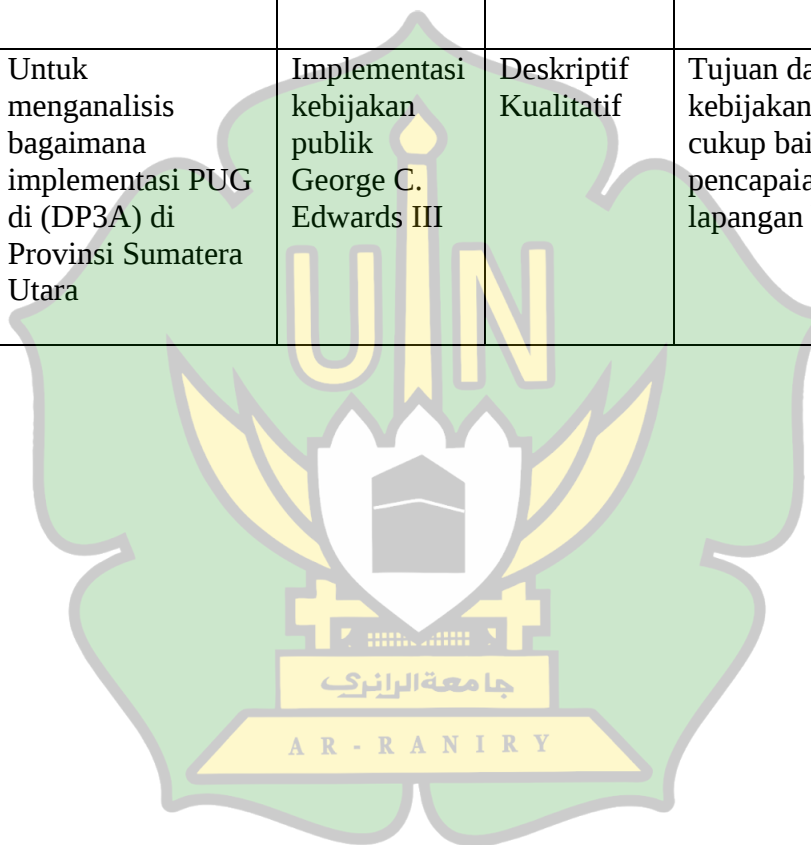
2.	Dwi Ramadhan (2021) ⁶⁶	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai	Untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota Dumai dalam melaksanakan PUG dalam pembangunan	Implementasi kebijakan Edward III	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan PUG di Kota Dumai belum optimal karena pemahaman aparaturnya terhadap konsep gender masih rendah dan koordinasi antarinstansi belum berjalan baik.	Fokus pada pembangunan daerah secara umum di kota, belum mengkaji karakteristik aktor pelaksana dan resistensi budaya adat
3.	Dwi Tazqiatul Barroroh, (2020) ⁶⁷	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Oleh Pemerintah Kota Batu	Mengetahui bagaimana dan sejauh mana proses pelaksanaan kebijakan PUG oleh pemerintah Kota Batu baik dari segi pemerintah dan sosial.	Implementasi kebijakan Edward III	Deskriptif kualitatif	Pemerintah kota telah menjalankan kebijakan PUG, tetapi pelaksanaannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata	Lokasi penelitian adalah kota dengan karakter masyarakat urban dan lebih terbuka. Penelitian ini mengangkat konteks masyarakat adat Gayo yang menerapkan syariat Islam dan nilai patriarki yang lebih kental
4.	Nanik Mandasari, (2022) ⁶⁸	Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik	Menganalisis kebijakan yang responsif gender di	Gender Analysis Pathway (GAP).	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan PUG di tingkat dinas provinsi telah berjalan namun masih terkendala koordinasi	Fokus pada satu dinas di level provinsi, sedangkan penelitian ini menganalisis

⁶⁶ Dwi Ramadhan, “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

⁶⁷ Barroroh, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Kota Batu.”

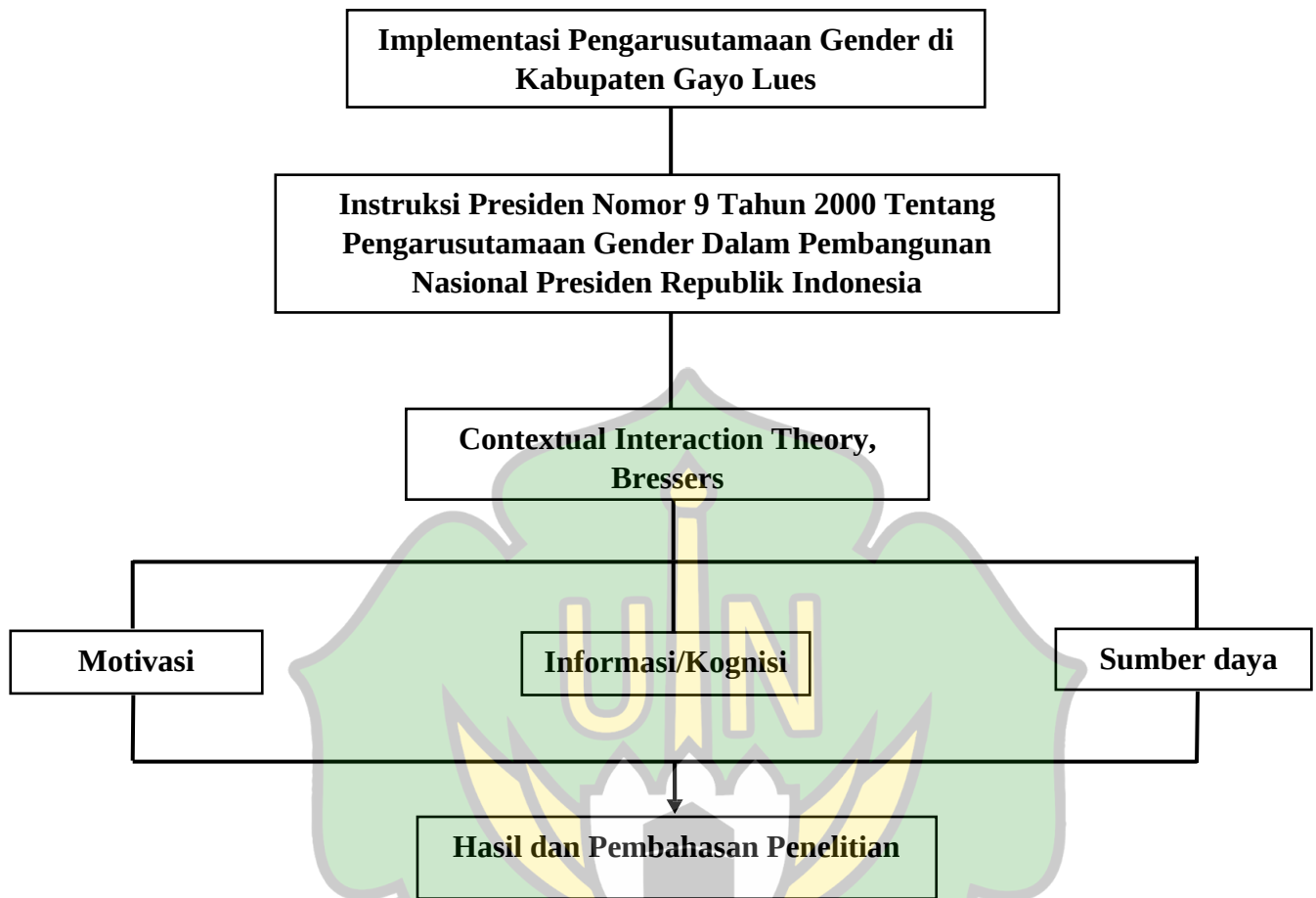
⁶⁸ Mandasari, “Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi).”

		(Studi Kasus di DP3AP2 Provinsi Jambi)	(DP3AP2) Provinsi Jambi.			lintas Organisasi Perangkat Daerah	implementasi lintas OPD di level kabupaten dengan pendekatan karakteristik aktor
5.	Sekar Sion Napitulu, (2022) ⁶⁹	Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Untuk menganalisis bagaimana implementasi PUG di (DP3A) di Provinsi Sumatera Utara	Implementasi kebijakan publik George C. Edwards III	Deskriptif Kualitatif	Tujuan dan kegiatan kebijakan telah tersusun cukup baik, tetapi pencapaian pelaksanaan di lapangan belum maksimal	Fokus pada dinamika administratif satu dinas provinsi. Penelitian ini menyorot tantangan implementasi di kabupaten dengan hambatan struktural dan budaya yang berbeda



⁶⁹ Napitupulu, “Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.”

2.3 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini digunakan untuk menggambarkan alur pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah. Penelitian berfokus pada pelaksanaan PUG di Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam proses pembangunan daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender.

Untuk membedah pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, penelitian ini menerapkan Contextual Interaction Theory yang dikembangkan oleh Hans Bressers. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses interaksi dinamis antara para aktor pelaksana. Berdasarkan teori tersebut, terdapat tiga karakteristik utama aktor yang digunakan sebagai alat analisis. Pertama adalah Motivasi, yang melihat komitmen dan kepentingan para aktor terhadap program PUG. Kedua adalah Informasi atau Kognisi, yang mengukur tingkat pemahaman aktor serta ketersediaan data pendukung terkait gender. Ketiga adalah Kekuasaan atau Sumber Daya, yang melihat kecukupan anggaran, sarana, dan kemampuan aparatur dalam menjalankan program. Perpaduan ketiga karakteristik ini pada aktor pelaksana dan aktor sasaran menghasilkan Proses Interaksi, yaitu bentuk komunikasi dan koordinasi yang terjalin antarinstansi pemerintah maupun dengan kelompok sasaran. Ketiga karakteristik beserta proses interaksi yang dihasilkannya turut dibingkai oleh konteks luas berupa nilai budaya adat Gayo dan norma patriarki yang menjadi ciri khas wilayah penelitian. Melalui analisis terhadap ketiga karakteristik dan proses interaksi ini, penelitian akan menghasilkan Hasil dan Pembahasan Penelitian yang menyajikan potret utuh mengenai faktor pendukung, kendala, serta capaian nyata dari penerapan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gayo Lues.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues. Pemilihan metode ini bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman mengenai realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan serta pengalaman subjek secara komprehensif. Sesuai pemikiran Moleong, pendekatan ini menekankan pada pengungkapan temuan melalui bahasa dan kata-kata dalam konteks yang alami. Dengan menggunakan beragam metode pengumpulan data, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan wawasan terperinci sekaligus memahami signifikansi fenomena tersebut dalam lingkup yang lebih luas.⁷⁰

3.2 Fokus Penelitian

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Contextual Interaction Theory, Bressers	a. Motivasi b. Informasi/Kognisi c. Kekuasaan/Sumber daya d. Proses Interaksi (hasil dari ketiga karakteristik di atas)	Cheryl de Boer and Hans Bressers, <i>Complex and Dynamic Implementation Processes: The Renaturalization of the Dutch Regge River</i> (Enschede: University of Twente, 2011)

⁷⁰ Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong RT. 06 RW. 02 Gedangan-Sidoarjo)," *Jurnal Pendidikan Anak*, 2020, 57–62.

3. 3 Lokasi Penelitian

Penetapan Kabupaten Gayo Lues sebagai lokasi penelitian didasari oleh ketertarikan peneliti terhadap kontrasnya hubungan antara kebijakan modern dan tatanan adat yang masih sangat terjaga. Secara akademik, Gayo Lues menawarkan lanskap sosiologis yang unik karena memiliki karakter budaya adat yang sangat kuat. Di wilayah ini, nilai-nilai tradisional bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan Kompas yang mengendalikan interaksi sosial sehari-hari. Hal ini memicu pertanyaan besar tentang bagaimana strategi nasional seperti Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat bernegosiasi dengan sistem patriarki yang sudah mengakar di tengah masyarakat Gayo.

3.4 Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:⁷¹

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, baik melalui pihak lain maupun dari berbagai dokumen yang tersedia. Menurut Sugiyono, data sekunder berasal dari sumber yang tidak secara langsung

⁷¹ Nurjanah, *Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda*, Jurnal Mahasiswa, 2021. Vol.1

memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen yang relevan, buku, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian.

3. 5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian karena keberhasilan penelitian sangat bergantung pada tersedianya data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷² Tanpa teknik yang tepat, kita tidak akan bisa memperoleh informasi yang sesuai dengan standar dan tujuan riset. Oleh sebab itu, proses ini harus direncanakan dengan matang agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Idealnya, data diambil langsung dari kondisi alami agar bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara menyeluruh. Dengan metode dan sumber yang pas, kita tidak hanya mendapatkan informasi yang berkualitas, tapi juga menjamin validitas dan keandalan hasil penelitian tersebut.⁷³ Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dan informan yang dilakukan melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai suatu permasalahan.⁷⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, tetapi tetap memberikan ruang kepada peneliti

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2022), 224.

⁷³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, 2019

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 231.

untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan kondisi yang ditemukan selama proses wawancara. Teknik ini digunakan agar informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan fokus penelitian sekaligus dapat menggali pengalaman dan pandangan informan secara lebih mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau kondisi yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Menurut Hadi dalam Sugiyono, observasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.⁷⁵ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kabupaten Gayo Lues dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lapangan. Hasil pengamatan tersebut kemudian didukung dengan dokumentasi visual dan dokumen resmi sebagai bagian dari data penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai sudut pandang subjek melalui berbagai bahan tertulis maupun dokumen yang berkaitan dengan informan.⁷⁶ Dokumen ini bisa berupa laporan, foto, surat, buku, maupun catatan resmi lainnya. Melalui teknik ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran mengenai latar belakang sejarah, kebijakan, hingga perkembangan fenomena yang sedang diteliti. Intinya, metode ini sangat efektif untuk memperkuat temuan

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 227.

⁷⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023),

penelitian dengan cara menganalisis bukti-bukti nyata yang sudah tersedia di lapangan.

3. 6 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pihak yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.⁷⁷ Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut:

Pemilihan setiap kategori informan di atas didasarkan pada pertimbangan yang berbeda-beda sesuai posisi dan keterkaitannya dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gayo Lues. Pejabat dan staf dari DP3AP2KB serta BAPPEDA dipilih karena memiliki kewenangan formal dalam merumuskan, mengelola anggaran, dan mengawal kebijakan gender di tingkat daerah, sehingga mereka dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Aktivis dari UPTD PPA dipilih karena posisinya sebagai pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sehingga memahami persoalan yang muncul di luar ruang birokrasi. Sementara itu, masyarakat penerima manfaat dilibatkan supaya penelitian ini tidak hanya menampilkan sudut pandang pemerintah, tetapi juga sudut pandang warga yang secara langsung merasakan atau menyaksikan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di kampungnya.

⁷⁷ Metodologi Penelitian Kualitatif, oleh Lexy J. Moleong (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 132–133.

Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian

No.	INFORMAN	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (DP3AP2KB) Gayo Lues	Perempuan	1
2.	Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3AP2KB) Gayo Lues	Perempuan	1
3.	Staf Perencana dan Focal Point (DP3AP2KB) Gayo Lues	Perempuan	1
4.	Kasubag Umum & Kepegawaian, Ahli Muda Perencana Bidang Program Perencanaan Pembangunan, serta Ahli Muda Perencana Bidang Perencanaan SDM (BAPPEDA) Gayo Lues	Laki-laki	3
5.	Penata Kelola UPTD PPA (Aktivis Gender) Gayo Lues	Perempuan	1
6.	Masyarakat Penerima Manfaat	2 Perempuan, 1 Laki-laki	3
	Total		10

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Dilihat dari komposisinya, sepuluh informan penelitian ini terdiri dari enam perempuan dan empat laki-laki. Komposisi ini bukan hasil penentuan kuota di awal, melainkan mengikuti kondisi riil siapa yang menduduki posisi terkait dan siapa yang bersedia diwawancarai pada masing-masing kampung dan instansi. Meski begitu, komposisi tersebut tetap relevan untuk penelitian ini karena topik pengarusutamaan gender pada dasarnya menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga penting untuk mendengar suara dari kedua pihak, baik dari sisi pelaksana kebijakan maupun dari sisi masyarakat yang menerima program.

Khusus untuk kategori masyarakat penerima manfaat, tiga informan yang dilibatkan mewakili dua kelompok yang berbeda. Dua informan, yaitu Ibu Saptiah dan Ibu Suriani, mewakili kelompok ibu rumah tangga yang sekaligus berprofesi sebagai petani dan pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan di kampung mereka. Keduanya dipilih karena dapat menjelaskan langsung

bagaimana program pemberdayaan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pertimbangan mereka untuk terlibat atau tidak dalam suatu kegiatan. Satu informan lainnya, yaitu Bapak Kamri, mewakili sudut pandang laki-laki sebagai warga kampung yang turut mengamati pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di lingkungan sosialnya. Kehadiran informan laki-laki pada kategori ini penting supaya penelitian tidak hanya menangkap pengalaman perempuan sebagai sasaran program, tetapi juga cara pandang laki-laki terhadap upaya kesetaraan gender di kampungnya sendiri.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data perlu diuji untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data antara lain:⁷⁸

1. Kredibilitas

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap data dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Penelitian kualitatif dikatakan kredibel apabila hasil temuannya dapat dipercaya serta mampu menggambarkan permasalahan, kondisi, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang diteliti secara tepat.

2. Transferabilitas

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana temuan suatu penelitian dapat digunakan pada kelompok atau kondisi lain yang memiliki karakteristik serupa.

⁷⁸ Dedi Susanto, Risnita dan M. Syahrani Jailani, *Teknik Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2023

Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti perlu menyajikan proses dan hasil penelitian secara rinci dan sistematis agar konteks penelitian dapat dipahami dengan jelas. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang memiliki konteks sejenis.

3. Dependabilitas

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian apabila penelitian dilakukan kembali pada waktu atau oleh peneliti yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Aspek ini dapat dinilai melalui pengulangan penelitian maupun proses audit terhadap data dan sumber pendukung oleh pihak lain. Menurut Brink, dependabilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan keterbukaan peneliti dalam menjelaskan proses dan tahapan penelitian secara transparan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat ditelaah dan dinilai secara lebih objektif oleh pihak lain.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses sistematis untuk mengolah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues. Merujuk pada pemikiran Miles dan Huberman serta Moleong, proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data di lapangan hingga penulisan laporan

akhir.⁷⁹ Menurut Ulber Silalahi dalam Nurdewi, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:⁸⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data hasil lapangan agar lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh dirangkum dan dikelompokkan berdasarkan empat aspek utama implementasi, yaitu:

- a. Motivasi: Memilah data terkait komitmen, kepentingan, dan dorongan aktor pelaksana maupun aktor sasaran terhadap kebijakan PUG.
- b. Informasi/Kognisi: Mengelompokkan data mengenai tingkat pemahaman aktor serta ketersediaan data dan pedoman teknis terkait gender.
- c. Kekuasaan/Sumber Daya: Mengidentifikasi kapasitas staf, kecukupan anggaran responsif gender, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kewenangan yang dimiliki masing-masing aktor.
- d. Proses Interaksi: Mengorganisir data mengenai pola koordinasi, komunikasi, negosiasi, maupun konflik antaraktor yang terbentuk dari perpaduan ketiga karakteristik di atas dalam pelaksanaan PUG di Gayo Lues.

2. Penyajian Data

Data yang telah melalui tahap reduksi selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara hambatan budaya patriarki, ketiga

⁷⁹ Nurdewi, *Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Riset Ilmiah, 2022. Vol.1

⁸⁰ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart ASN," 301.

karakteristik aktor, serta proses interaksi yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Melalui penyajian yang sistematis, akan terlihat jelas karakteristik atau bentuk interaksi mana yang paling dominan menjadi penghambat atau pendukung efektivitas PUG di Kabupaten Gayo Lues, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami kompleksitas masalah yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diverifikasi. Kesimpulan tersebut menggambarkan implementasi PUG di Kabupaten Gayo Lues secara menyeluruh serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala birokrasi dan kultural yang ditemukan dalam penelitian.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang berada di kawasan pegunungan Leuser. Kabupaten ini resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Dari segi kondisi geografis, wilayah Gayo Lues memiliki karakteristik topografi yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan karena berada di kawasan gugusan Bukit Barisan.

Secara astronomis, Kabupaten Gayo Lues berada pada 03°40'26"–04°16'55" Lintang Utara (LU) dan 96°43'24"–97°55'24" Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah mencapai 554.991 ha atau sekitar 5.549,91 km². Dengan luas tersebut, Gayo Lues termasuk salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Aceh, yang mencakup sekitar 9,77 persen dari keseluruhan luas daratan provinsi.

Dikenal dengan julukan "Negeri Seribu Bukit" dan "Bumi Tari Saman", Gayo Lues memiliki karakteristik penggunaan lahan yang unik, di mana 71,18 persen wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan lindung demi menjaga keseimbangan ekosistem, sementara area budidaya hanya tersedia sebesar 28,82 persen. Ibukota kabupaten berada di Blangkejeren ini berbatasan wilayah dengan beberapa kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya.

3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya.
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4. 1 Persentase dan Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan (persen/km²)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)	Luas (%)
1	Kuta Panjang	Kuta Panjang	269.53	4.86
2	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	382.42	6.89
3	Blangkejeren	Blangkejeren	166.06	2.99
4	Putri Betung	Gumpang	996.85	17.96
5	Dabun Gelang	Badak Bur Jumpe	444.71	8.01
6	Blang Pegayon	Cinta Maju	272.18	4.9
7	Pining	Pining	1350.09	24.33
8	Rikit Gaib	Ampa Kolak	264.08	4.76
9	Pantan Cuaca	Kenyaran	295.06	5.32
10	Terangun	Terangun	671.8	12.1
11	Tripe Jaya	Rerebe	437.13	7.88
	Jumlah		5549.91	100

Sumber: RKPK Gayo Lues 2026

Secara struktur birokrasi, kabupaten ini membawahi 11 kecamatan yang terdiri dari 25 mukim dan 148 kampung. Kecamatan Pining tercatat sebagai wilayah paling luas yang mencakup 24,33 persen dari total luas kabupaten, sedangkan Kecamatan Blangkejeren, meskipun berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, merupakan wilayah terkecil dengan proporsi hanya 2,99 persen.

Dari sisi demografi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, populasi Gayo Lues terus mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 106.136 jiwa, naik dari 104.856 jiwa pada tahun

sebelumnya. Meskipun angka ini hanya merepresentasikan sekitar 3,15 persen dari total populasi Provinsi Aceh, laju pertumbuhan penduduk yang signifikan sebesar 3,15 persen menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang di wilayah ini.

4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues mempunyai visi dan misi, yaitu visi Kabupaten Gayo Lues adalah:

“TERWUJUDNYA GAYO LUES YANG ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Kemudian untuk mewujudkan visi ini, ditetapkan empat misi utama sebagai arah strategis pembangunan daerah. Misi ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik Gayo Lues sebagai daerah dengan nilai keislaman yang kuat, kekayaan budaya yang khas, serta potensi ekonomi yang berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang Islami Sebagai daerah yang menjunjung tinggi ajaran Islam, pembangunan di Gayo Lues harus berlandaskan nilai-nilai religius dalam menciptakan keberlangsungan kehidupan sosial yang berkarakter dan berakhlak.
2. Mewujudkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Gayo Lues memiliki potensi ekonomi besar, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, industri, energi dan pariwisata. Untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan strategi pengelolaan sumber

daya yang berorientasi pertambahan nilai dan berbasis potensi fisik wilayah dengan didukung oleh kemantapan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih membutuhkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang inovatif, efisien, dan efektif, serta didukung oleh aparatur yang profesional, memiliki kinerja optimal, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Misi ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi serta kehidupan sosial yang lebih sejahtera.

4.2. Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan temuan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues. Data hasil wawancara disusun dan dikelompokkan berdasarkan tiga karakteristik aktor dalam Contextual Interaction Theory (CIT) yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu motivasi, informasi/kognisi, dan kekuasaan/sumber daya, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai proses interaksi sebagai hasil dari perpaduan ketiga karakteristik tersebut. Selain itu, peneliti juga menyajikan data mengenai konteks struktural dan sosial budaya yang melingkupi pelaksanaan PUG di Gayo Lues, serta perspektif masyarakat

sebagai kelompok sasaran program turut disajikan secara terintegrasi pada setiap indikator.

4.2.1 Motivasi Aktor (Actor's Motivation)

Karakteristik motivasi para pelaksana kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan adanya perbedaan orientasi antara dorongan yang bersumber dari nilai moral dan kesadaran pribadi pada tingkat pelaksana teknis dengan komitmen yang lebih berorientasi pada pemenuhan ketentuan formal dan regulasi pada tingkat birokrasi yang lebih luas.

Pada tingkat pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), keberlanjutan pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG) didorong oleh adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan. Dorongan tersebut semakin kuat karena para pelaksana berhadapan secara langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi yang masih dihadapi oleh perempuan, khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan bagi pelaksana teknis untuk tetap mempertahankan dan menjalankan program PUG sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues:

“Kalau jujur dari hati saya, kalau cuma melihat anggaran daerah yang terbatas ini, mungkin dari dulu kami sudah menyerah. Tapi dorongan terbesar saya dan tim itu muncul setiap kali turun langsung ke kampung-kampung di Gayo Lues ini. Kami melihat nyata di depan mata bagaimana beratnya perjuangan para perempuan kepala keluarga dan janda kurang mampu yang harus banting tulang sendirian demi menghidupi anak-anak mereka. Di situ muncul tanggung jawab pribadi dan moral yang besar di

hati saya; kalau kami di dinas ikut menyerah, siapa lagi yang mau menyuarakan nasib mereka.”⁸¹

Sementara itu, dukungan dari pimpinan daerah secara kelembagaan terlihat melalui berbagai bentuk kebijakan dan tindakan administratif. Dukungan tersebut antara lain ditunjukkan dengan menetapkan regulasi yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), mendorong agar aspek gender dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memberikan kesempatan bagi pelaksana untuk melakukan sosialisasi dan membangun koordinasi dengan berbagai sektor terkait⁸². Komitmen politik tersebut kemudian diterjemahkan oleh BAPPEDA Gayo Lues melalui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues Tahun 2025–2029. Ahli Muda Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues menjelaskan bahwa integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan didorong oleh masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan:

“Salah satu perspektif yang mendorong Bappeda memasukan gender kedalam Dokumen RPJMK Gayo Lues 2025-2029 adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Gayo Lues masih relative rendah berdasarkan data sebesar 72,09 %, diukur dari partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan tiga indikator yaitu: Persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, sumbangan pendapatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, yang merupakan indikator dari indeks pemberdayaan gender (IDG)...”⁸³

Meskipun demikian, motivasi kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lainnya masih beragam dan cenderung didorong oleh kepatuhan terhadap instruksi serta ketentuan dari pemerintah pusat, daripada tumbuh dari pemahaman

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

⁸² Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

⁸³ Wawancara dengan Ahli Muda Perencana BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

dan kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender.⁸⁴ Sadikin, Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, menekankan bahwa komitmen tersebut diperlukan agar keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tidak hanya digunakan untuk memenuhi formalitas, tetapi dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, seperti menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁸⁵

Bagi *Gender Focal Point* (GFP) pada instansi teknis, kesediaan untuk menjalankan peran tambahan di tengah beban tugas utama didukung oleh semakin berkembangnya pemahaman mengenai pentingnya isu gender. Pemahaman tersebut berkaitan dengan kenyataan bahwa persoalan gender tidak hanya menyangkut perempuan, tetapi juga berpengaruh terhadap pemerataan akses dan pelayanan bagi kelompok yang rentan, termasuk perempuan yang bekerja sebagai petani, anak-anak, serta lanjut usia.⁸⁶ Namun, pada kelompok sasaran, khususnya masyarakat kampung, keterlibatan dalam program pemberdayaan lebih banyak didorong oleh manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mempertimbangkan hasil nyata yang diperoleh dari program tersebut. Ibu Saptiah, sebagai salah satu informan dari kalangan ibu rumah tangga dan petani, menggambarkan sikap realistis masyarakat tersebut:⁸⁷

“...Kalau kegiatannya jelas ada manfaat langsung buat dapur atau ekonomi kami, dek. Misalnya pelatihan yang bisa bikin kami dapat penghasilan tambahan, atau kalau ada pembagian bantuan bibit dan modal. Kami pasti usahakan datang. Tapi kalau cuma datang duduk, dengar ceramah panjang-

⁸⁴ Wawancara Ahli Muda Perencana BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

⁸⁵ Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

⁸⁶ Wawancara dengan Gender Focal Point DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Saptiah, Masyarakat Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, 19 April 2026

panjang malas kami datangkan, sementara kerjaan di sawah atau di kebun sere numpuk, ya kami milih gak datang.”⁸⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Petue Kampung Badak, bahwa keterlibatan warga dalam kegiatan sosialisasi umumnya dipengaruhi oleh adanya manfaat secara materi maupun arahan dari tokoh masyarakat.⁸⁹

4.2.2 Informasi/Kognisi

Pemahaman mengenai konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kemampuan dalam menggunakan instrumen teknis yang responsif gender di Kabupaten Gayo Lues masih terpusat pada lembaga-lembaga penggerak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut belum tersebar secara merata di lingkungan birokrasi maupun di tingkat masyarakat.

DP3AP2KB melakukan penyebarluasan informasi PUG melalui peningkatan kapasitas internal secara berkala serta memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kecamatan sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi dari organisasi perempuan.⁹⁰ Namun, pemahaman aparatur pada instansi di luar dinas penggerak terhadap instrumen teknis PUG, seperti Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), *Gender Analysis Pathway* (GAP), dan *Gender Budget Statement* (GBS), masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan instrumen PUG di lingkungan birokrasi belum merata, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan:

“...pemahaman teman-teman di OPD lain soal PPRG, GAP, apalagi yang teknis seperti GAP dan GBS itu masih jauh dari kata paham. Jangankan

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Saptiah, Masyarakat Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, 19 April 2026

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kamri, Masyarakat Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, 19 April 2026

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

OPD lain, di internal staf kita sendiri pun masih meraba-raba karena instrumen analisis gender ini polanya rumit sekali kalau tidak dilatih terus-menerus. Dan Sebagian juga masi banyak yang gatau juga tentang istilah istilah begitu.”⁹¹

Ketimpangan kemampuan teknis tersebut juga ditemukan di BAPPEDA.

Para perencana masih dalam proses menyesuaikan diri dalam penggunaan GAP dan GBS, meskipun pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi sudah dinilai cukup jelas.⁹² Faktor lain yang turut memengaruhi pemahaman birokrasi adalah masih adanya anggapan di kalangan OPD teknis bahwa isu gender sepenuhnya menjadi tanggung jawab DP3AP2KB.⁹³

Tantangan dalam aspek kognitif juga berkaitan dengan kendala administratif, terutama belum optimalnya pengelolaan data terpilah berdasarkan gender. Aparatur pada Bidang Program Perencanaan dan SDM BAPPEDA mengungkapkan bahwa proses validasi data makro masih menghadapi kendala karena data sektoral yang disampaikan oleh dinas teknis belum sepenuhnya akurat:

“... data yang ada sekarang ya baru bisa mendukung buat gambaran umum atau perencanaan awal saja sih. Tapi kalau mau dibilang bikin programnya langsung pas sasaran banget, jujur belum bisa maksimal karena datanya belum sedetail itu. Soalnya kenyataan di lapangan, dinas-dinas itu biasanya baru bisa kasih data totalan saja... Padahal kita kan butuh tahu dari total itu berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan...”⁹⁴

Permasalahan data terpilah yang belum valid juga dirasakan oleh pihak di luar birokrasi. Santiara dari UPTD PPA Kecamatan Blangkejeren menjelaskan bahwa akses terhadap data publik terkait gender masih cukup terbatas dan membutuhkan proses birokrasi yang panjang. Kondisi tersebut membuat

⁹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

⁹² Wawancara dengan Ahli Muda Perencana BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

⁹³ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

⁹⁴ Wawancara dengan Aparatur Bidang Program Perencanaan dan SDM BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

lembaganya perlu melakukan pengumpulan data secara mandiri di lapangan untuk mendukung kegiatan advokasi.⁹⁵

Pada tingkat masyarakat desa, penyampaian informasi mengenai hak-hak perempuan dan konsep PUG masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dinilai belum mendapatkan informasi tersebut secara memadai.⁹⁶ Ibu Suriani, warga Rikit Dekat, menjelaskan bahwa pengetahuan perempuan di desa mengenai program pemerintah masih sebatas program kesehatan rutin, seperti Posyandu dan Keluarga Berencana (KB), serta kegiatan pembagian bibit tanaman.⁹⁷

4.2.3 Kekuasaan/Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, sarana pendukung, dan kewenangan formal menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan program PUG di Gayo Lues. Dari sisi kelembagaan, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan PUG di DP3AP2KB mengalami penurunan cukup besar. Berdasarkan keterangan Fitri Juliana Nasution selaku Kasubbag Keuangan, anggaran operasional PUG yang sebelumnya berada di kisaran Rp150 juta pada 2022–2023 menurun menjadi sekitar Rp50 juta dalam perencanaan anggaran tahun 2025.⁹⁸ Kondisi keuangan daerah yang terbatas menyebabkan dinas belum mampu memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada OPD lainnya.⁹⁹

⁹⁵ Wawancara dengan Aktivis UPTD PPA Kecamatan Blangkejeren, 13 April 2026

⁹⁶ Wawancara dengan Aktivis UPTD PPA Kecamatan Blangkejeren, 13 April 2026

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Suriani, Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, 20 April 2026

⁹⁸ Wawancara dengan Kasubbag Keuangan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 9 April 2026

⁹⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

Dari sisi fasilitas fisik, DP3AP2KB Gayo Lues belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga masih menggunakan fasilitas yang tersedia di UPTD PPA.¹⁰⁰ Kendala struktural juga dihadapi oleh *Gender Focal Point* (GFP) pada instansi sektoral. Dalam pelaksanaannya, tugas GFP masih dirangkap dengan pekerjaan utama tanpa dukungan waktu khusus, fasilitas operasional yang memadai, maupun keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran strategis di lingkungan SKPK.¹⁰¹

Pada proses penganggaran daerah, dukungan terhadap alokasi dana PUG tidak lagi bergantung pada penyampaian argumentasi teoretis. Hal ini karena penganggaran tersebut telah berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah serta kebutuhan pembiayaan wajib untuk pendampingan hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.¹⁰² Meskipun demikian, kendala terbesar berada pada upaya mempertahankan alokasi anggaran PUG dalam proses perencanaan BAPPEDA agar tidak terkena pengurangan akibat kebijakan rasionalisasi anggaran daerah.¹⁰³

Sementara itu, keterbatasan sumber daya yang dihadapi perempuan kampung terlihat dari terbatasnya waktu yang mereka miliki. Beban pekerjaan rumah tangga yang harus dijalankan bersamaan dengan pekerjaan sebagai buruh tani sere wangi membuat waktu dan tenaga mereka banyak tersita, sehingga kesempatan untuk mengikuti kegiatan di ruang publik menjadi terbatas.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

¹⁰¹ Wawancara dengan Gender Focal Point DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

¹⁰² Wawancara dengan Kasubbag Keuangan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 9 April 2026

¹⁰³ Wawancara dengan Kasubbag Keuangan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 9 April 2026

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Suriani, Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, 20 April 2026

4.2.4 Pemaparan Data Proses Interaksi Antar-Aktor dan Konteks Kultural

A. Pola Interaksi dan Koordinasi Birokrasi (Interaction Processes)

Koordinasi resmi antarinstansi dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG, dengan BAPPEDA berperan dalam perencanaan dan DP3AP2KB sebagai pihak yang menggerakkan pelaksanaan program.¹⁰⁵ Untuk mengatasi kendala koordinasi yang disebabkan oleh kepentingan sektoral, BAPPEDA melakukan pendampingan secara langsung melalui pembagian Pokja PUG menjadi empat kelompok, yaitu Pokja A, B, C, dan D. Masing-masing kelompok bertugas mengawal proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap SKPK.¹⁰⁶

Namun, pelaksanaan koordinasi tersebut masih menghadapi penolakan dari beberapa dinas teknis, terutama yang menangani bidang infrastruktur. Hendra Syahputra dari BAPPEDA menjelaskan bahwa sebagian instansi teknis menunjukkan keberatan ketika diwajibkan memasukkan indikator gender dalam pelaksanaan proyek fisik:

“Kesulitan paling nyata itu ya karena sebagian dinas di tempat kita ini ngerasa program mereka gak ada hubungannya sama sekali sama gender, Dek. Contoh gampangnya kayak Dinas PUPR Gayo Lues, mereka kan mikirnya cuman ngurusin proyek jembatan sama bangun jalan aja, jadi ngerasa mana ada urusan gender di situ. Makanya pas kita mau nyusun dokumen perencanaan atau RKPD, banyak SKPK yang gak mau muat masalah PUG ini. Sejauh ini yang bapak tau yang beneran jalan... ya cuman di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum, sama Pemberdayaan Perempuan aja...”¹⁰⁷

Resistensi dalam hubungan antaraparatur tidak hanya terlihat dari penolakan terhadap program, tetapi juga muncul dalam proses komunikasi di dalam

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ahli Muda Perencana BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

forum rapat. Perencana Ahli Muda Radinah menyampaikan bahwa penyampaian isu gender dalam forum lintas sektor terkadang masih dianggap kurang penting dan bahkan menjadi bahan candaan di kalangan aparatur laki-laki.¹⁰⁸ Hubungan antara pemerintah daerah dan aktivis LSM lokal masih cenderung menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak pelengkap dalam proses administrasi, terutama untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam kegiatan atau forum pemerintah.¹⁰⁹

B. Konteks Sosiokultural Adat Gayo (Wider Context)

Lapisan konteks sosial budaya masyarakat di Kabupaten Gayo Lues turut memengaruhi pelaksanaan PUG. Dalam tata pemerintahan adat desa, prinsip *Jema Opat* menjadi salah satu dasar pengaturan kehidupan masyarakat, dengan posisi laki-laki yang masih dominan dalam proses pengambilan keputusan formal.¹¹⁰ Dominasi budaya tersebut turut memengaruhi keterlibatan perempuan dalam forum resmi, termasuk Musrenbang desa. Keterlibatan laki-laki yang lebih kuat dalam ruang publik menyebabkan kebutuhan khusus perempuan, seperti dukungan peralatan pertanian bagi buruh tani perempuan dan fasilitas Posyandu, belum menjadi prioritas utama dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik.¹¹¹

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BAPPEDA menerapkan pendekatan yang lebih kompromistis dengan menyediakan forum khusus perempuan sebelum pelaksanaan Musrenbang utama. Langkah ini dilakukan untuk memberikan ruang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Gender Focal Point DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, 8 April 2026

¹⁰⁹ Wawancara Aktivis Gender UPTD PPA Kecamatan Blangkejeren, 13 April 2026

¹¹⁰ Wawancara Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

¹¹¹ Wawancara Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

bagi perempuan dalam menyampaikan aspirasinya sekaligus menghindari konflik dengan tatanan *Jema Opat* yang masih berlaku.¹¹²

Resistensi budaya tersebut juga dipengaruhi oleh nilai yang berkembang di kalangan perempuan Gayo, khususnya sikap *kemel* yang membuat mereka cenderung merasa sungkan atau malu untuk menyampaikan pendapat dan berdebat di hadapan umum.¹¹³ Pandangan patriarki yang mengakar kuat melahirkan stereotip bahwa wilayah kerja perempuan secara adat berada pada ranah *ku dapur* (di dapur).¹¹⁴ Kondisi tersebut terlihat dari pernyataan Ibu Suriani yang mengungkapkan bahwa perempuan masih mengalami keterbatasan dalam mengikuti rapat dimenasah dalam pengambilan penting:

“...kebiasaan di kampung kita masih menganggap kalo urusan rapat-rapat kampung dimesjid perempuan ga diikuti karena kita sebagai perempuan ni dianggap ngga bisa nyelesain masalah atau mengambil keputusan penting, itu urusannya kaum laki-laki. Perempuan kalau bicara terlalu keras di depan umum kadang masih dianggap kurang baik atau tabu...”¹¹⁵

Meskipun demikian, hasil temuan lapangan menunjukkan adanya perubahan pola sosial pada generasi muda di wilayah perkotaan sekitar Blangkejeren. Sebagian mulai menerapkan pembagian tugas rumah tangga yang lebih seimbang, salah satunya terlihat dari keterlibatan laki-laki dalam membantu mengasuh anak.¹¹⁶ Di samping itu, sistem adat Gayo sesungguhnya menyediakan ruang penghormatan tersendiri bagi perempuan pada ritus-ritus adat tertentu seperti

¹¹² Wawancara Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, 7 April 2026

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Kamri, Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, 19 April 2026

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kamri, Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, 19 April 2026

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Suriani, Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, 20 April 2026

¹¹⁶ Wawancara dengan Marlina Dewi, *Op.Cit.* Lihat juga Wawancara dengan Ibu Saptiah, *Op.Cit.*

tradisi *Tepung Tawar*, tradisi meratap *Pongot*, maupun dalam tarian tradisional *Bines*.¹¹⁷

Kearifan lokal ini dinilai oleh kalangan aktivis sebagai modal sosial yang strategis. Struktur penyelesaian masalah berbasis kekeluargaan di tingkat desa (*sidang kampung*) melalui pranata *Jema Opat* dapat dioptimalkan sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan anak, dengan syarat para pemangku adat diberikan pembekalan pemahaman yang baik mengenai keadilan gender.¹¹⁸

4.3 Pembahasan Penelitian

Bagian ini menganalisis data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya dengan menggunakan Contextual Interaction Theory (CIT) sebagai pisau analisis, guna menjawab dua rumusan masalah penelitian secara berurutan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan di Kabupaten Gayo Lues, serta apa saja hambatan dan tantangan yang menyertai pelaksanaannya.

4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues

Sub bab ini menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana implementasi kebijakan PUG berjalan di Kabupaten Gayo Lues. CIT menempatkan tiga karakteristik aktor, yaitu motivasi, informasi atau kognisi, dan kekuasaan atau sumber daya, sebagai penentu utama jalannya proses interaksi antaraktor, yang pada gilirannya menentukan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.¹¹⁹

Motivasi Aktor: Dikotomi antara Dorongan Moral dan Kepatuhan Formal

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kamri, *Op.Cit.* Lihat juga Wawancara dengan Ibu Suriani, *Op.Cit.*

¹¹⁸ Wawancara Aktivis Gender UPTD PPA Kecamatan Blangkejeren, 13 April 2026

¹¹⁹ Hans Bressers, *Contextual Interaction Theory and the Issue of Boundary Definition: Governance and the Motivation, Cognitions, and Resources of Actors*, CSTM Studies and Reports No. 323 (Enschede: University of Twente, Center for Clean Technology and Environmental Policy, 2007).

Karakteristik motivasi dalam pelaksanaan PUG memperlihatkan perbedaan antara dorongan moral dan pribadi pada pelaksana teknis dengan komitmen yang lebih berorientasi pada aturan formal pada pimpinan SKPK di luar DP3AP2KB. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB memiliki dorongan yang terbentuk dari pengalaman langsung dalam melihat kondisi sosial dan ekonomi perempuan kepala keluarga di Gayo Lues. Sementara itu, berdasarkan penjelasan Ahli Muda Perencanaan BAPPEDA, pimpinan SKPK lainnya lebih cenderung menjalankan PUG sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku karena PUG telah menjadi bagian dari misi RPJMN dan tugas organisasi. Dalam perspektif CIT, motivasi seorang aktor dapat dipengaruhi oleh nilai dan tujuan pribadi, kepentingan bersama, serta tuntutan kelembagaan yang muncul melalui aturan dan insentif organisasi.¹²⁰

Jika ditinjau secara kritis, temuan tersebut menunjukkan bahwa DP3AP2KB sebagai aktor penggerak memiliki motivasi yang lebih kuat karena didasarkan pada nilai dan kesadaran internal dalam menjalankan PUG. Sebaliknya, motivasi SKPK lainnya yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan cenderung belum kuat dan mudah berubah, karena keberlanjutan pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh adanya instruksi yang tegas dari kepala daerah, sebagaimana disampaikan oleh Ahli Muda Perencanaan BAPPEDA.

Pada kelompok masyarakat sasaran, keikutsertaan dalam program lebih banyak dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang dapat diperoleh secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Saptiah dan diperkuat oleh keterangan Bapak Kamri yang menunjukkan bahwa partisipasi warga cukup bergantung pada adanya

¹²⁰ Bressers, *Contextual Interaction Theory*.

insentif materi. Pola tersebut sejalan dengan penelitian di Provinsi Jambi yang menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan perempuan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan PUG, selain pengaruh nilai adat dan media massa.¹²¹ Orientasi ekonomi tersebut dapat dipahami sebagai pilihan yang wajar dalam kondisi masyarakat agraris seperti Gayo Lues yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Namun, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar program pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemberian manfaat ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender.

Temuan lain menunjukkan adanya perubahan motivasi pada Gender Focal Point (GFP). Pada awalnya, ia menjalankan tugas tambahan karena adanya penunjukan dari pimpinan. Namun, seiring meningkatnya pemahaman mengenai dampak persoalan gender terhadap kelompok rentan, seperti perempuan tani, anak-anak, dan lansia, motivasinya berkembang menjadi lebih berasal dari kesadaran pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif CIT, motivasi tidak selalu terbentuk sejak awal, tetapi dapat berkembang melalui proses interaksi, pengalaman, dan pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan.

Informasi dan Kognisi Aktor: Kesenjangan Kapasitas Teknis di Balik Regulasi yang Sudah Jelas

Pola utama dalam aspek informasi atau kognisi menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsep dan instrumen teknis PUG masih terpusat pada DP3AP2KB dan BAPPEDA sebagai lembaga penggerak. Sementara itu, pemahaman pada instansi lain maupun masyarakat masih tergolong terbatas.

¹²¹ Mandasari, "Analisis Pengarusutamaan Gender," 50–59.

Marlina Dewi menyampaikan bahwa instrumen seperti PPRG, GAP, dan GBS belum banyak dipahami oleh staf OPD lainnya, bahkan masih terdapat aparatur yang belum mengenal istilah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tersedianya pedoman dan regulasi yang jelas belum otomatis membuat pelaksana memahami aspek teknis PUG. Dalam perspektif CIT, kognisi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap tujuan kebijakan, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan instrumen kebijakan dalam pelaksanaannya.¹²² Kesenjangan inilah yang menjelaskan mengapa model implementasi struktural seperti Van Meter dan Van Horn, yang digunakan dalam penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara,¹²³ cenderung menekankan kejelasan standar dan sasaran kebijakan sebagai unsur struktural yang berdiri sendiri, sementara CIT justru mampu menjelaskan bahwa persoalan sesungguhnya terletak pada kognisi aktor secara individual, yang tidak otomatis terbentuk hanya karena regulasi di atas kertas sudah jelas.

Permasalahan kognisi juga semakin terlihat dari belum tersedianya data terpilah gender yang memadai. Khairul Abdi menjelaskan bahwa sebagian besar dinas teknis masih menyampaikan data secara umum tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menyulitkan perencanaan dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus perempuan sebagai dasar penyusunan program, sehingga kepentingan tersebut berisiko kembali terabaikan dalam proses perencanaan selanjutnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten Pandeglang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG belum optimal karena

¹²² Bressers, *Contextual Interaction Theory*.

¹²³ Napitupulu, "Implementasi Pengarusutamaan Gender."

masih terdapat OPD yang kurang aktif dan konsisten dalam menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.¹²⁴ Kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Gayo Lues, terutama masih adanya anggapan bahwa persoalan gender merupakan tanggung jawab DP3AP2KB saja, padahal pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.

Kekuasaan dan Sumber Daya Aktor: Titik Simpul Paling Membatasi

Dari ketiga karakteristik CIT, kekuasaan dan sumber daya tampak sebagai titik simpul yang paling membatasi implementasi PUG di Gayo Lues. Tren penurunan anggaran dari sekitar seratus lima puluh juta rupiah pada 2022 hingga 2023 menjadi sekitar lima puluh juta rupiah pada 2025, ketiadaan gedung mandiri DP3AP2KB, serta posisi GFP yang dijalankan dalam skema rangkap tugas tanpa akses langsung pada pengambilan keputusan strategis anggaran, secara bersama-sama memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam pengertian CIT bukan semata soal ketersediaan dana, melainkan juga soal otoritas formal untuk memengaruhi Keputusan.¹²⁵ Kondisi GFP menggambarkan bahwa ketiga karakteristik dalam CIT tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling memengaruhi satu sama lain. Walaupun motivasi pribadi sudah terbentuk dan pemahaman terhadap isu gender terus meningkat, keterbatasan kewenangan formal membuat kedua hal tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas.

Perbandingan dengan penelitian di Kota Sukabumi memberi catatan kritis yang penting. Kota Sukabumi tercatat telah memiliki infrastruktur regulasi PUG

¹²⁴ Ayissa Tazkia, Listyaningsih, dan Cadith Juliannes, "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2022).

¹²⁵ Bressers, *Contextual Interaction Theory*.

yang relatif lebih matang, antara lain Kelompok Kerja PUG yang dibentuk sejak 2017 dan Peraturan Wali Kota tentang pedoman pelaksanaan PUG sejak 2018, namun capaian Indeks Pemberdayaan Gender di kota tersebut justru mengalami penurunan pada periode 2020 hingga 2022.¹²⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa kematangan regulasi dan kelembagaan tidak secara otomatis menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk menerjemahkan komitmen normatif menjadi capaian nyata, sebuah pelajaran yang relevan bagi Gayo Lues yang saat ini masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan PUG dengan tren anggaran yang menurun.

Pada masyarakat sasaran, keterbatasan sumber daya terlihat dari minimnya waktu yang tersedia bagi perempuan akibat harus menjalankan pekerjaan rumah tangga sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai buruh tani, seperti yang dialami Ibu Saptiah dan Ibu Suriani. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan tidak selalu menunjukkan kurangnya motivasi atau kesadaran. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan waktu yang mereka miliki, sehingga pelaksanaan program perlu mempertimbangkan jadwal yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Proses Interaksi sebagai Cerminan Perpaduan Tiga Karakteristik

Sesuai dengan proposisi inti CIT bahwa proses interaksi merupakan titik temu tempat motivasi, kognisi, dan kekuasaan antaraktor saling dipertukarkan,¹²⁷ Pola interaksi yang ditemukan di Gayo Lues menunjukkan bahwa ketiga karakteristik tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi perilaku setiap aktor.

¹²⁶ Rahminigrum dan Rachmawati, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender," 47–55.

¹²⁷ Rahmini Rahminigrum dan Rachmawati, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender," 47–55.

Koordinasi yang berjalan baik pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, dan DP3AP2KB, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cenderung menunjukkan resistensi, sebagaimana disampaikan Ahli Muda Perencanaan BAPPEDA, dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman PUPR mengenai keterkaitan isu gender dengan pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh rendahnya dorongan untuk menerapkan PUG karena tuntutan regulasi belum dirasakan secara sama pada setiap sektor.

Marginalisasi terhadap suara GFP dalam forum lintas dinas, yang terkadang masih dianggap kurang penting oleh aparatur laki-laki, menunjukkan bahwa proses interaksi dalam CIT tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik pihak yang menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh cara aktor lain memahami dan merespons informasi tersebut. Kondisi serupa terlihat pada keterlibatan UPTD PPA yang masih cenderung diposisikan sebagai pelengkap untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Pola ini menunjukkan adanya partisipasi yang lebih bersifat formal, karena keterlibatan secara administratif telah terpenuhi, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan pemberian ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan.

Konteks sosial budaya yang tercermin dalam tatanan *Jema Opat* turut membentuk pola interaksi antaraktor bahkan sebelum forum formal dilaksanakan. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan menyebabkan posisi perempuan dalam Musrenbang menjadi kurang seimbang sejak awal. Untuk merespons kondisi tersebut, BAPPEDA menggunakan strategi yang lebih adaptif melalui forum khusus perempuan sebelum Musrenbang utama. Langkah ini dilakukan untuk membuka ruang bagi perempuan dalam menyampaikan kebutuhan tanpa berhadapan secara langsung dengan ketentuan adat. Pendekatan tersebut sejalan

dengan penelitian di Jambi yang menekankan pentingnya strategi khusus bagi perempuan serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam menghadapi hambatan yang berasal dari nilai-nilai adat.¹²⁸ Kesamaan strategi antara Gayo Lues dan Jambi, meski keduanya memiliki struktur adat yang berbeda, menunjukkan bahwa forum paralel semacam ini merupakan pola adaptif yang cukup umum digunakan pemerintah daerah di Indonesia untuk mengakomodasi suara perempuan tanpa mengubah struktur pengambilan keputusan formal itu sendiri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai adat di Gayo Lues memiliki pengaruh yang lebih kompleks dan tidak dapat dilihat hanya sebagai faktor penghambat kesetaraan gender. Di satu sisi, nilai *kemel* yang membuat perempuan merasa sungkan untuk tampil di ruang publik serta pandangan bahwa perempuan berada pada ranah '*ku dapur*' membatasi keterlibatan mereka dalam urusan publik. Hal tersebut terlihat dari keterangan Ibu Suriani mengenai terbatasnya keterlibatan perempuan dalam rapat kampung di menasah. Namun di sisi lain, sistem adat yang sama justru menyediakan ruang penghormatan tersendiri bagi perempuan dalam ritus tertentu seperti tepung tawar, pongot, dan tari Bines, sebagaimana dijelaskan Bapak Kamri. Adat Gayo Lues dengan demikian tidak dapat digeneralisasi sebagai satu kesatuan yang seragam menghambat atau mendukung kesetaraan gender, melainkan bersifat selektif, yaitu memberikan otoritas simbolis dan ritual kepada perempuan pada ranah tertentu sembari tetap menahan otoritas politik dan pengambilan keputusan formal di ranah lain.

Secara umum, hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG di Gayo Lues sudah berlangsung, tetapi

¹²⁸ Mandasari, "Analisis Pengarusutamaan Gender"

belum merata jika dilihat dari ketiga karakteristik CIT. Motivasi yang kuat pada DP3AP2KB belum cukup untuk mendukung pelaksanaan PUG apabila tidak disertai sumber daya dan kewenangan yang memadai. Demikian pula, regulasi yang telah disusun secara jelas pada tingkat pusat belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan teknis yang baik di tingkat pelaksana. Kewenangan formal melalui Pokja PUG juga masih menghadapi keterbatasan ketika berkoordinasi dengan aktor yang memiliki pemahaman dan dorongan terhadap isu gender yang masih rendah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi PUG sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara motivasi, kognisi, kekuasaan, dan sumber daya pada setiap aktor yang terlibat.

4.3.2 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues

Sub bab ini menjawab rumusan masalah kedua mengenai hambatan dan tantangan yang menyertai pelaksanaan PUG di Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan analisis pada sub bab sebelumnya, hambatan yang ditemukan dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan konteks sebagaimana dikemukakan dalam CIT, yaitu konteks spesifik yang melekat langsung pada lembaga penggerak, konteks struktural yang menyangkut relasi antarlembaga dan kelembagaan pendukung, serta konteks luas yang menyangkut nilai sosial budaya masyarakat.¹²⁹

Hambatan pada Konteks Spesifik

1. Keterbatasan anggaran yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk PUG dan PPRG tercatat menurun dari sekitar seratus lima puluh juta rupiah pada rentang tahun 2022 hingga 2023 menjadi sekitar lima puluh

¹²⁹ Bressers, *Contextual Interaction Theory*.

juta rupiah pada tahun 2025, sehingga DP3AP2KB kesulitan mendanai bimbingan teknis yang intensif dan berkelanjutan bagi OPD lain.

2. Kesenjangan kapasitas teknis aparatur dalam mengoperasikan instrumen analisis gender. Pemahaman staf DP3AP2KB maupun OPD lain terhadap PPRG, GAP, dan GBS masih jauh dari memadai, bahkan sebagian aparatur belum mengenal istilah tersebut sama sekali, meskipun pedoman normatif dari pusat dan provinsi sudah tersedia.
3. Ketiadaan gedung operasional mandiri bagi DP3AP2KB, yang sampai saat ini masih menumpang pada fasilitas UPTD PPA, sehingga membatasi ruang kerja dan penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas secara reguler.
4. Ketiadaan data terpilah gender yang memadai dari dinas-dinas teknis. Data yang diserahkan kepada BAPPEDA umumnya masih berupa data total tanpa rincian jenis kelamin, sehingga penyusunan program yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender masih terkendala.

Hambatan pada Konteks Struktural

1. Motivasi lintas OPD yang masih bergantung pada kepatuhan formal. Komitmen pimpinan SKPK di luar DP3AP2KB pada umumnya lebih didorong oleh kewajiban untuk mengikuti regulasi daripada kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender. Kondisi ini membuat keberlanjutan pelaksanaan PUG masih sangat dipengaruhi oleh adanya arahan atau instruksi dari kepala daerah.
2. Miskonsepsi kelembagaan yang memandang isu gender sebagai tugas eksklusif DP3AP2KB, bukan tanggung jawab lintas sektor, sehingga sebagian OPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merasa program mereka tidak relevan dengan isu gender.

3. Keterbatasan kekuasaan formal Gender Focal Point. GFP menjalankan tugasnya dalam skema rangkap jabatan tanpa tunjangan waktu, fasilitas kerja yang memadai, maupun akses langsung dalam pengambilan keputusan strategis anggaran di internal SKPK masing-masing.
4. Lemahnya posisi suara Gender Focal Point dalam forum lintas dinas. Penyampaian pandangan GFP dalam forum koordinasi terkadang masih kurang mendapat perhatian dari sebagian aparaturnya laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan pengaruh GFP terhadap keputusan pada instansi teknis lainnya masih terbatas dan lebih banyak berada pada tingkat pemberian saran atau rekomendasi.
5. Posisi lembaga non pemerintah yang belum setara sebagai mitra kebijakan. Lembaga aktivis seperti UPTD PPA Kecamatan Blangkejeren masih ditempatkan sebagai pelengkap demi pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam forum atau rapat, bukan sebagai mitra yang dilibatkan secara substantif sejak tahap perencanaan.

Hambatan pada Konteks Luas

1. Dominasi struktur adat Jema Opat dalam pengambilan keputusan formal di tingkat desa, yang menempatkan laki-laki seperti gecik dan Petue sebagai pemegang otoritas utama, sehingga forum Musrenbang desa didominasi kehadiran laki-laki dan usulan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan proyek fisik dibandingkan kebutuhan spesifik perempuan.
2. Nilai kemel atau rasa sungkan perempuan untuk tampil dan berbicara di depan umum, serta stereotip adat yang menempatkan ranah kerja perempuan secara adat pada wilayah domestik atau dapur, yang membatasi keterlibatan

perempuan dalam forum pengambilan keputusan formal seperti rapat kampung di menasah.

3. Keterbatasan waktu pada perempuan kampung. Perempuan kampung menghadapi keterbatasan waktu karena harus membagi tenaga antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sebagai buruh tani. Kondisi tersebut membuat waktu dan tenaga yang tersedia untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan di luar rumah menjadi terbatas.
4. Sosialisasi mengenai hak perempuan dan istilah PUG yang masih macet pada level seremonial pemerintahan di tingkat kabupaten, sehingga warga di kampung-kampung yang lebih terpencil seperti Pining dan Tripe Jaya belum banyak tersentuh oleh sosialisasi tersebut.

Ketiga belas hambatan tersebut menunjukkan bahwa, jika dianalisis berdasarkan proposisi utama CIT, permasalahan dalam pelaksanaan PUG di Gayo Lues tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Hambatan tersebut muncul karena terdapat kelemahan pada satu atau beberapa karakteristik aktor dalam setiap lapisan konteks, yang kemudian memengaruhi kualitas interaksi antaraktor. Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan secara terpadu dengan memperkuat ketiga karakteristik tersebut. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan motivasi lintas sektor agar tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan, peningkatan pemahaman melalui pelatihan teknis secara berkelanjutan, serta penguatan kewenangan dan sumber daya bagi lembaga penggerak, Gender Focal Point, maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan Contextual Interaction Theory (CIT) sebagai pisau analisis, penelitian ini menarik dua kesimpulan yang secara langsung menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

1. Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues telah berjalan tetapi belum menunjukkan hasil yang merata jika ditinjau dari tiga karakteristik aktor dalam CIT, yaitu motivasi, informasi/kognisi, dan kekuasaan/sumber daya. Ketidakmerataan tersebut turut memengaruhi pola interaksi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan. Dari aspek motivasi, terdapat perbedaan antara dorongan moral dan pribadi yang cukup kuat pada DP3AP2KB sebagai lembaga penggerak dengan kecenderungan pimpinan SKPK lainnya yang lebih menjalankan PUG berdasarkan tuntutan regulasi. Sementara itu, keterlibatan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang dapat diperoleh secara langsung. Dari aspek informasi atau kognisi, pemahaman mengenai konsep dan instrumen PUG, seperti PPRG, GAP, dan GBS, masih terpusat pada lembaga penggerak dan belum tersebar secara merata di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi oleh anggapan bahwa persoalan gender hanya menjadi tanggung jawab DP3AP2KB serta belum tersedianya data terpilah gender yang memadai. Pada aspek kekuasaan dan sumber daya, keterbatasan anggaran,

belum tersedianya gedung operasional sendiri, serta terbatasnya kewenangan formal GFP menjadi kendala utama dalam pelaksanaan PUG. Akibatnya, motivasi dan pemahaman yang telah dimiliki oleh beberapa aktor belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam hasil kebijakan yang nyata. Ketimpangan tersebut kemudian terlihat dalam interaksi antaraktor, ditandai dengan koordinasi yang belum merata antar-OPD, suara GFP yang masih kurang mendapat perhatian dalam forum lintas dinas, serta keterlibatan lembaga aktivis yang lebih sering bersifat administratif daripada sebagai mitra yang memiliki peran substantif dalam proses perencanaan kebijakan.

2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues menghadapi empat belas hambatan dan tantangan yang dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan konteks CIT. Pada konteks spesifik, hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran yang cenderung menurun, kesenjangan kapasitas teknis aparatur dalam mengoperasikan instrumen analisis gender, ketiadaan gedung operasional mandiri bagi DP3AP2KB, serta ketiadaan data terpilah gender yang memadai. Pada konteks struktural, hambatan yang ditemukan meliputi motivasi lintas OPD yang bersifat compliance driven dan rentan, miskonsepsi kelembagaan yang memandang gender sebagai tugas eksklusif satu dinas, keterbatasan kekuasaan formal Gender Focal Point, marginalisasi suara Gender Focal Point dalam forum lintas dinas, serta posisi lembaga non pemerintah yang belum setara sebagai mitra kebijakan. Pada konteks luas, hambatan yang ditemukan meliputi dominasi struktur adat Jema Opat dalam pengambilan keputusan formal di tingkat desa, nilai kemel dan stereotip adat yang membatasi ruang publik perempuan, kemiskinan waktu perempuan kampung akibat beban

ganda domestik dan ekonomi, serta sosialisasi PUG yang masih macet pada level seremonial kabupaten dan belum menjangkau kampung-kampung terpencil. Ketiga lapisan hambatan ini saling berkelindan, sehingga penyelesaiannya memerlukan intervensi yang menyentuh ketiga karakteristik CIT secara bersamaan pada setiap lapisan konteks, bukan hanya penguatan pada salah satu aspek saja.

Sebagai catatan tambahan yang memperkaya kedua kesimpulan di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa nilai adat Jema Opat di Kabupaten Gayo Lues bersifat selektif, bukan monolitik. Di satu sisi, struktur adat ini membatasi ruang politik dan pengambilan keputusan formal perempuan, namun di sisi lain tetap menyediakan ruang penghormatan simbolis bagi perempuan melalui ritus seperti tepung tawar, pongot, dan tari Bines. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pelibatan tokoh adat dalam mendukung PUG ke depan perlu dirancang secara spesifik dengan memanfaatkan ranah adat yang sudah menghormati perempuan, bukan menghadapkan program secara frontal dengan keseluruhan tatanan adat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dinas terkait, tokoh adat, serta peneliti selanjutnya.

5.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

1. Pemerintah daerah perlu menerbitkan Qanun atau Peraturan Bupati khusus yang mengatur pelaksanaan PUG secara komprehensif di tingkat kabupaten,

agar pelaksanaannya tidak lagi hanya mengacu pada payung hukum tingkat provinsi maupun peraturan yang bersifat parsial.

2. Instruksi tegas dari Bupati kepada seluruh pimpinan SKPK mengenai kewajiban integrasi perspektif gender ke dalam program kerja masing-masing dinas perlu dijadikan kebijakan yang berkelanjutan, mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi SKPK di luar DP3AP2KB masih sangat bergantung pada ada tidaknya instruksi tersebut.
3. Pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi alokasi anggaran untuk program PUG dan PPRG, mengingat tren penurunan anggaran yang ditemukan dalam penelitian ini berisiko melemahkan capaian yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

5.2.2 Bagi DP3AP2KB dan Gender Focal Point

1. DP3AP2KB perlu menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas secara berkelanjutan mengenai instrumen PPRG, GAP, dan GBS kepada seluruh perencana SKPK, disertai mekanisme pendokumentasian yang baku agar pengetahuan tidak hilang ketika terjadi mutasi pegawai.
2. Perlu dipertimbangkan pemberian dukungan yang lebih memadai kepada Gender Focal Point di setiap dinas, baik dalam bentuk alokasi waktu kerja yang jelas, fasilitas operasional, maupun akses langsung dalam pengambilan keputusan strategis anggaran, agar peran GFP tidak lagi dijalankan sekadar sebagai tugas tambahan yang rentan termarginalkan.
3. DP3AP2KB perlu melibatkan tokoh adat Jema Opat secara lebih sistematis dalam sosialisasi PUG, dengan memanfaatkan ranah adat yang telah menghormati perempuan seperti tradisi tepung tawar dan Pongot sebagai

pintu masuk, alih-alih menghadapkan program secara frontal dengan keseluruhan tatanan adat.

5.2.3 Bagi BAPPEDA dan Badan Keuangan Daerah

1. BAPPEDA perlu menyusun standar operasional prosedur pengumpulan data terpilah gender dari seluruh dinas teknis, agar data yang tersedia tidak lagi berupa data total, sehingga penyusunan program dapat lebih tepat sasaran.
2. Forum rembuk khusus perempuan sebelum pelaksanaan Musrenbang utama yang telah diinisiasi BAPPEDA perlu dilembagakan secara resmi dalam pedoman teknis perencanaan pembangunan desa, agar keberlanjutannya tidak bergantung pada inisiatif individu aparat kampung semata.
3. BAPPEDA perlu mendorong seluruh SKPK, termasuk dinas yang berorientasi infrastruktur seperti PUPR, untuk mempertimbangkan dimensi gender dalam perencanaan program fisik, misalnya aspek keamanan dan aksesibilitas perempuan terhadap fasilitas public.

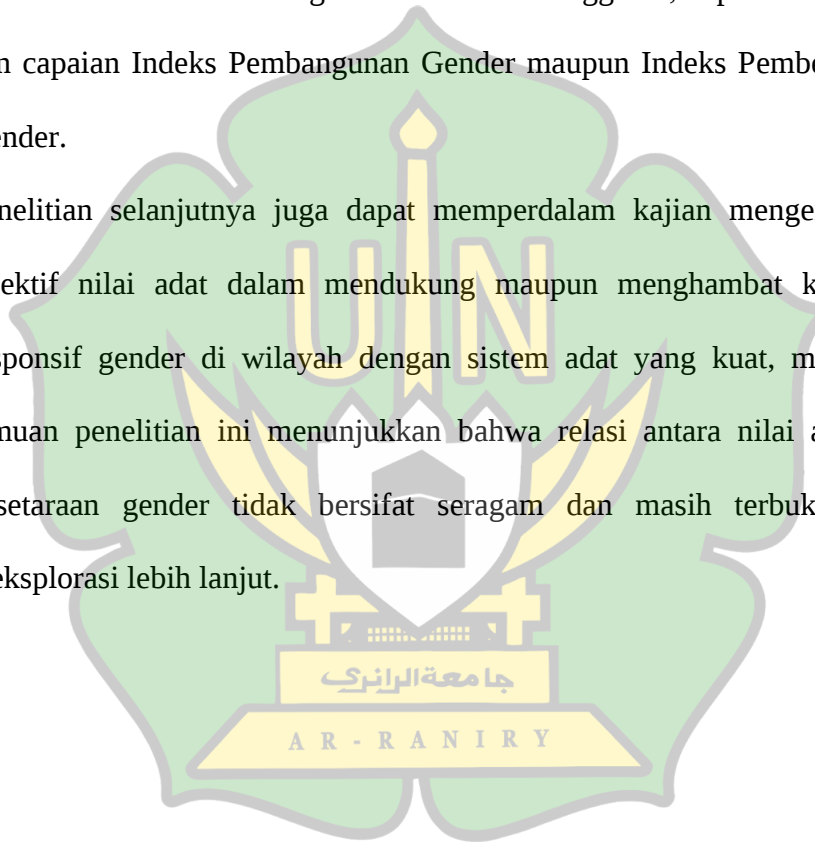
5.2.4 Bagi Tokoh Adat dan Masyarakat

1. Para pemangku adat Jema Opat, termasuk gecik, Petue, dan Imem di tingkat kampung, disarankan untuk memperoleh pembekalan mengenai perspektif keadilan gender, agar penyelesaian masalah keluarga melalui sidang kampung tetap melindungi hak-hak perempuan dan anak.
2. Penjadwalan kegiatan pemberdayaan bagi perempuan kampung perlu mempertimbangkan pola kerja harian perempuan sebagai buruh tani, misalnya dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan di luar jam kerja utama,

mengingat kemiskinan waktu terbukti menjadi hambatan partisipasi yang lebih dominan dibandingkan kurangnya kesadaran atau motivasi.

5.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi PUG di Kabupaten Gayo Lues atau daerah dengan karakteristik sosial budaya serupa dengan pendekatan kuantitatif atau mixed method, guna mengukur secara lebih terukur hubungan antara alokasi anggaran, kapasitas aparatur, dan capaian Indeks Pembangunan Gender maupun Indeks Pemberdayaan Gender.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam kajian mengenai sifat selektif nilai adat dalam mendukung maupun menghambat kebijakan responsif gender di wilayah dengan sistem adat yang kuat, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara nilai adat dan kesetaraan gender tidak bersifat seragam dan masih terbuka untuk dieksplorasi lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nur, Nurhaemin, dan Sulaeman. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut KH. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 3 (April 2024): 64–79.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus. "Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025–2029," 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. *Indeks Pembangunan Manusia dan Data Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Gayo Lues*, 2025.
- Barroroh, Dwi Tazqiatul. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Kota Batu." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020.
- Bressers, Hans. *Contextual Interaction Theory and the Issue of Boundary Definition: Governance and the Motivation, Cognitions, and Resources of Actors*. CSTM Studies and Reports No. 323. Enschede: University of Twente, Center for Clean Technology and Environmental Policy, 2007.
- Bressers, Hans, Nanny Bressers, Stefan Kuks, dan Corinne Larrue. "The Governance Assessment Tool and Its Use." Dalam *Governance for Drought Resilience: Land and Water Drought Management in Europe*, 45–65. Cham: Springer International Publishing, 2016.
- De Boer, Cheryl, dan Hans Bressers. *Analyzing the Renaturalization of the Dutch Regge River: Complex and Dynamic Implementation Processes*. Enschede: University of Twente, 2011.
- Husein, Mustabsyirah, Rasyidah, Azmil Umur, Zulfatmi, dan Sakdiah. *Profil Gender Gayo Lues Tahun 2019*. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2019.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (Juni 2022): 284–302.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Kendi, Ibrahim Kristofol. *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*, 2023.
- Mandasari, Nanik. "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi)." *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 2, no. 2 (September 2022): 50–59.

- Marwiyah, Siti. *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu, 2022.
- Mazaya, Viky. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323–44.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Napitupulu, Sekar Sion. “Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.” Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, 2022.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Nurdewi. “Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 297–303.
- Nurjanah. “Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda.” *Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 117–28.
- Pangestoeti, Wahjoe, dan Suryaningsih. *Gender dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Tanjungpinang: Laboratorium Komunikasi dan Sosial, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues Tahun 2025–2029*.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.” Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2000.
- Rahminigrum, Anita, dan Ike Rachmawati. “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Sukabumi.” *JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2024): 47–55.
- Ramadhan, Dwi. “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rasyidah, dan Ismiati. *Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Aceh Tahun 2023–2026*. Banda Aceh: Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan SDM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, 2022.

- Santoso, Widjajanti M., Agustina Situmorang, Ade Latifa, Aulia Hadi, Sentiela Oktaviana, Jane Kartika Propiana, dan Jaleswary Pramodhawardhani. *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta: LIPI Press, 2016.
- Savitri, Fia Nyimas, Evy Ratna Kartika Waty, Mega Nurrisaliah, Ade Adillia, Trias Ramadhanti, dan Hera Marwiyanti. "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara." *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 1–10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 27. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Tazkia, Ayissa, Listyaningsih, dan Cadith Juliannes. "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2022).
- Wandani, Nabilah Sukma, Indra Aditya, dan Nidaul Muthmainah. "Analisis Program Magang IM Japan di Kabupaten Karawang: Tinjauan Indikator Sumber Daya." *Jurnal Papatung* 9, no. 2 (2026): 188–98.
- Widiastuti, Ika. *Kebijakan Publik*. Diedit oleh Sunarno S. Atmodjo. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Wulandari, Devi. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2023.
- Yuslin, Hasnidar. "Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia* 1, no. 3 (2021).
- Zubaidah. "Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Aula The Legend." *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues*, 16 Juli 2024. <https://www.gayolueskab.go.id/berita/kategori/berita-eksekutif/gaungkan-kesetaraan-gender-dp3ap2kb-adakan-sosialisasi-pug-dan-pprg>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3A2KB)

No.	Indikator Analisi	Pertanyaan Wawancara
1.	MOTIVASI	Apa yang menjadi dorongan utama bagi Bapak/Ibu dan tim untuk tetap menjalankan program PUG, meskipun mungkin ada tantangan di lapangan?
2.	MOTIVASI	Sejauh mana dukungan pimpinan daerah dirasakan dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender selama ini?
3.	INFORMASI / KOGNISI	Bagaimana proses sosialisasi konsep pengarusutamaan gender dilakukan, baik kepada staf internal maupun kepada OPD lain?
4.	INFORMASI / KOGNISI	Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apakah pemahaman staf dan OPD lain tentang instrumen seperti PPRG, GAP, dan GBS sudah cukup memadai?
5.	INFORMASI / KOGNISI	Bagaimana menghadapi dinas lain yang merasa bahwa urusan gender itu hanya tugas DP3AP2KB saja, bukan tugas mereka?
6.	INFORMASI / KOGNISI	Sejauh mana bimtek atau pelatihan yang diberikan selama ini betul-betul bisa meningkatkan kualitas layanan pelaksana kebijakan kita di lapangan, khususnya di Gayo Lues ini?
7.	INFORMASI / KOGNISI	Apa kendala yang paling sering muncul saat mencoba menyatukan data hasil capaian gender dari berbagai dinas yang berbeda?
8.	SUMBER DAYA	Bagaimana kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program PUG selama ini?
9.	SUMBER DAYA	Apakah ada kendala tertentu dalam hal sarana, data, atau tenaga terlatih yang dirasakan menghambat kerja tim?

10.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana pola koordinasi antara DP3AP2KB dengan BAPPEDA dan OPD lain berjalan selama proses perencanaan dan pelaksanaan PUG?
11.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun dengan tokoh adat atau masyarakat dalam menyampaikan program ini?
12.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana efektivitas pola kerja sama antara DP3AP2KB dengan BAPPEDA dan Badan Keuangan dalam mengawal siklus PUG?
13	KONTEKS STRUKTURAL / BUDAYA	Bagaimana nilai budaya lokal atau aturan adat di Gayo Lues memengaruhi cara masyarakat menerima program kesetaraan gender?

3. Pertanyaan Untuk BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues

No.	Indikator Analisi	Pertanyaan Wawancara
1.	MOTIVASI	Menurut pandangan Bapak/Ibu, seberapa penting mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan?
2.	MOTIVASI	Apa yang mendorong BAPPEDA memasukkan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD?
3.	MOTIVASI	Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apa sumber motivasi pimpinan OPD lain untuk mendukung isu PUG, apakah lebih pada kepatuhan aturan, kepentingan kinerja, atau nilai pribadi?
4.	INFORMASI / KOGNISI	Bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan data terpilah gender dalam penyusunan perencanaan pembangunan di BAPPEDA?
5.	INFORMASI / KOGNISI	Bagaimana kompetensi perencana di BAPPEDA dalam mengoperasikan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP)?
6.	INFORMASI / KOGNISI	Apakah pedoman teknis PUG yang diterima dari pusat/provinsi cukup jelas untuk diterjemahkan ke dalam

		program daerah atau justru sering menimbulkan multitafsir?
7.	SUMBER DAYA	Sejauh mana ketersediaan data terpilah gender saat ini mendukung ketepatan penyusunan program pembangunan daerah?
8.	SUMBER DAYA	Apa tantangan administratif utama dalam mengintegrasikan indikator gender sebagai indikator kinerja mandiri, bukan sekedar menumpang pada program sektor lain?
9.	PROSES INTERAKSI	Sejauh mana peran Pokja PUG dalam mencairkan 'ego sektoral' atau sulitnya koordinasi antar dinas di sini, Pak?
10.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana pola koordinasi antara DP3AP2KB dengan BAPPEDA dan OPD lain berjalan selama proses perencanaan dan pelaksanaan PUG?
11.	PROSES INTERAKSI	Apa kesulitan paling nyata saat Bapak mencoba memasukkan indikator gender ke dalam dokumen penting seperti RPJMD atau RKPD di Gayo Lues ini, Pak?
12.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana strategi BAPPEDA dalam mensosialisasikan visi strategis PUG agar dipahami secara seragam oleh seluruh perencana di SKPD Kabupaten Gayo Lues?
13	KONTEKS STRUKTURAL / BUDAYA	Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah kondisi sosial budaya masyarakat Gayo Lues yang kental dengan nilai adat turut memengaruhi arah kebijakan pembangunan yang disusun BAPPEDA?

4. Pertanyaan Untuk Badan Keuangan / Tim Anggaran (DP3AP2KB)

No.	Indikator Analisi	Pertanyaan Wawancara
1.	MOTIVASI	Dalam situasi anggaran terbatas, mana yang biasanya didahulukan: proyek fisik/infrastruktur atau program pemberdayaan berbasis gender?
2.	MOTIVASI	Bagaimana strategi Bapak/Ibu supaya program gender ini tidak 'tercoret' saat ada kebijakan penghematan anggaran daerah?

3.	INFORMASI / KOGNISI	Bagaimana proses pemberian pemahaman kepada tim anggaran mengenai urgensi penyusunan Gender Budget Statement (GBS)?
4.	INFORMASI / KOGNISI	Adakah kesulitan dalam sistem laporan keuangan kita saat ini untuk memantau apakah anggaran gender sudah terealisasi dengan benar?
5.	INFORMASI / KOGNISI	Adakah kesulitan dalam sistem laporan keuangan kita saat ini untuk memantau apakah anggaran gender sudah terealisasi dengan benar?
6.	SUMBER DAYA	Berapa besar alokasi anggaran daerah yang disediakan untuk pelatihan PUG dan PPRG ini, Bu?
7.	SUMBER DAYA	Apa kendala teknis yang paling sering muncul dalam memvalidasi alokasi anggaran khusus untuk program berbasis gender?

5. Pertanyaan Untuk Gender Fokal Point

No.	Indikator Analisi	Pertanyaan Wawancara
1.	MOTIVASI	Apa yang membuat Bapak/Ibu bersedia menjalankan tugas tambahan sebagai Gender Focal Point di sela pekerjaan utama?
2.	INFORMASI / KOGNISI	Sejauh mana kejelasan instruksi dari pemerintah kabupaten mengenai tugas dan fungsi utama seorang Gender Focal Point?
3.	KEKUASAAN / SUMBER DAYA	Apakah Bapak/Ibu diberi waktu, fasilitas, dan kewenangan yang cukup untuk menjalankan peran ini secara efektif?
4.	KEKUASAAN / SUMBER DAYA	Seberapa mudah mengakses data terpilah dari OPD lain untuk mendukung tugas advokasi internal?
5.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana reaksi teman kerja atau lingkungan sekitar saat Bapak/Ibu menyuarakan isu-isu sensitif gender dalam rapat atau pertemuan publik?

6. Pertanyaan Untuk Aktivis Gender

No.	Indikator Analisi	Pertanyaan Wawancara
1.	MOTIVASI	Apa yang membuat Bapak/Ibu bersedia menjalankan tugas tambahan sebagai Gender Focal Point di sela pekerjaan utama?
2.	INFORMASI / KOGNISI	Apakah sosialisasi soal hak-hak perempuan dan kesetaraan ini sudah sampai ke masyarakat paling bawah, atau masih sebatas di lingkungan kantor pemerintahan saja?
3.	KEKUASAAN / SUMBER DAYA	Apakah selama ini mudah mendapatkan data terpilah dari pemerintah untuk bahan advokasi masyarakat?
4.	PROSES INTERAKSI	Bagaimana hubungan antara lembaga Ibu/Bapak dan pemerintah daerah sekarang? Apakah sudah dianggap mitra penting atau hanya sekadar pelengkap saja?
5.	KONTEKS STRUKTURAL / BUDAYA	Gayo Lues kan kental kali sama adat dan kearifan lokalnya. Menurut Ibu/Bapak bagian mana dari adat kita yang sebenarnya bisa dipakai buat mendukung perlindungan perempuan dan anak?

7. Pertanyaan Untuk Aktor Masyarakat Penerima Manfaat

No.	Indikator Analisi	Pertanyaan Wawancara
1.	MOTIVASI	Kalau Ibu/Bapak diundang ikut kegiatan seperti itu, apa yang membuat tertarik untuk datang, atau justru memilih tidak datang?
2.	INFORMASI / KOGNISI	Selama ini, program atau kegiatan seperti apa dari pemerintah yang Ibu/Bapak tahu berkaitan dengan pemberdayaan atau kesetaraan perempuan di kampung ini?
3.	KEKUASAAN / SUMBER DAYA	Menurut Ibu/Bapak, apa kesulitan paling nyata yang dirasakan perempuan di kampung ini untuk bisa terlibat

		aktif, baik di kegiatan pemerintah, ekonomi, maupun pengambilan keputusan di kampung?
4.	PROSES INTERAKSI	Selama ini, apakah pernah ada aparat kampung atau petugas dinas yang datang langsung menjelaskan atau menampung masukan soal isu perempuan, atau selama ini programnya berjalan sendiri tanpa banyak komunikasi?
5.	KONTEKS STRUKTURAL / BUDAYA	Kalau boleh jujur, menurut Ibu/Bapak, apakah nilai-nilai atau kebiasaan di kampung ini (adat, agama, atau kebiasaan sehari-hari) lebih mendukung atau justru menghambat perempuan untuk lebih aktif di luar rumah?



Lampiran 2

Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3075/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-S0/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Musdawati, S.Ag., M.A.** Sebagai pembimbing I
2. **Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.** Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Surno

NIM : 220802105

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-385/Un.08/FISIP.1.05/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802105

Nama : SURNA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Kp.Badak

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GAYO LUES**

Banda Aceh, 09 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 4

Balasan Surat Penelitian DP3A2KB



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jl. Alur Batin Komplek Kantor Pemda. Telepon (0642) 2340036 Fax. (0642) 2340036
BLANGKEJEREN

Blangkejeren, 08 April 2026 M
19 Syawal 1447 H

Nomor : 463.2 / 68 / 2026
Lampira : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh,

1. Berdasarkan surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah dengan nomor: B-385/Un.08/FISIP.1.05/03/2026, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : SURNA
Nim : 220802105
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VIII
2. Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Demikian surat balasan izin penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren
2. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren
3. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren
4. Pertinggal.

Lampiran 5

Balasan Surat Penelitian BAPPEDA



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Tgk. Mahmud No.3 Komplek Perkantoran Pemkab. Gayo Lues Tlpn/Fax (0642) 21599
BLANGKEJEREN - Kode Pos : 24653

Blangkejeren, 07 April 2026

Nomor : 050/237 /2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintah Universitas UIN Ar-Raniri,
di-

Banda Aceh

- Sehubungan Dengan Surat Saudari, Nomor : B-385/Un.08/FISIP.I.05./03/2026, Tanggal 09 Maret 2026. Prihal Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Skripsi atas nama :
Nama : SURNA
Nim : 220802105
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Berkaitan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa Benar telah melaksanakan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dengan judul Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gayo Lues.
- Demikian surat keterangan ini kami dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plh. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES


ABDUL RAHMAN, S.Pd
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP-19821006 200904 1 003
No. ND: Peg.875.1/05/1.1/IV/ND/2026
Tanggal. 06 April 2026

A R - R A N I R Y

Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan (DP3AP2KB)**



**Gambar 2. Wawancara Gender Fokal Point Dinas
Pemberdayaan Perempuan (DP3A2KB)**



**Gambar 3. Wawancara dengan Kasubbag Keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3AP2KB)**



**Gambar 4. Wawancara dengan Kasubag
Umum & Kepegawaian (BAPPEDA)**



**Gambar 5. Wawancara dengan Program Perencanaan & SDM,
serta Ahli Muda Perencanaan (BAPPEDA)**



Gambar 6. Wawancara dengan Aktivis Gender



Gambar 7. Wawancara dengan Masyarakat Kampung Badak



Gambar 8. Wawancara dengan Masyarakat Kampung Rikit Dekat